



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

EDISI 105 TAHUN 2024

MAJALAH BANK INDONESIA

BICARA



SCAN QR CODE
UNTUK MENGIKUTI
SURVEI DAN
DAPATKAN HADIAH
MENARIK



**DIGITALISASI
AKSELERASI
EKONOMI**



Ekonomi Indonesia tetap Kuat dan Stabil

Indonesia baru saja menjalani *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Asesmen yang dilakukan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank ini merupakan kali ketiga, setelah pelaksanaan sebelumnya dilakukan pada 2010 dan 2017.

Hasil asesmen menunjukkan **perekonomian dan sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi sehat dengan pertumbuhan yang kuat, stabil, dan cukup tangguh** dalam menghadapi gejala eksternal. Hasil asesmen FSAP Indonesia 2023/2024 terangkum dalam laporan *Financial System Stability Assessment* yang diterbitkan IMF, serta laporan *Financial Sector Assessment* dari World Bank.

SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH UNTUK EKONOMI TUMBUH

Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, terus melakukan transformasi digital. Kini, digitalisasi telah merambah berbagai bidang dan menjangkau hampir semua kalangan. Bank Indonesia (BI) menjadi salah satu pihak yang berperan signifikan dalam digitalisasi, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran.

Dalam lima tahun terakhir, digitalisasi sistem pembayaran dilakukan dengan mengacu pada *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang diluncurkan oleh BI pertama kali pada 2019. Sejak diimplementasikan, berbagai hasil positif telah diraih melalui inisiatif Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP), *QR Code Indonesian Standard* (QRIS), BI-FAST, elektronifikasi program sosial Pemerintah, Kartu Kredit Indonesia yang mendukung kelancaran transaksi keuangan Pemerintah, reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional, bahkan merambah konektivitas antarnegara.

Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, BI meluncurkan BSPI 2030 pada awal Agustus lalu. BSPI 2030 menandai langkah nyata BI dalam membangun sistem pembayaran yang tangguh untuk masa depan perekonomian Indonesia yang stabil dan bertumbuh.

Sementara itu, dalam lingkup internasional, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas negara atau



Ramdan Denny Prakoso
KEPALA DEPARTEMEN KOMUNIKASI
BANK INDONESIA

dikenal dengan *Local Currency Transaction* (LCT). Langkah itu ditempuh sebagai upaya pendalaman pasar keuangan, mengurangi volatilitas nilai tukar Rupiah, dan membentuk efisiensi harga.

LCT yang implementasinya dimulai sejak 2018 menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari peningkatan volume transaksi dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi, juga pembentukan harga yang semakin efisien. Saat ini, BI telah memiliki kerja sama LCT dengan 8 (delapan) negara. Ke depan, implementasi LCT dipastikan akan lebih luas dengan terbentuknya Satgas Nasional LCT yang beranggotakan 10 Kementerian/Lembaga, termasuk BI.

Sobat Rupiah, semua upaya itu dilakukan BI untuk mendukung perekonomian nasional agar tetap berdaya tahan dan tumbuh tinggi di tengah tantangan ketidakpastian global. Mari, kita turut berpartisipasi sesuai kapasitas masing-masing!

DAFTAR ISI

03 SALAM

04 DAFTAR ISI

05 EDITORIAL

06 LENSA

FEKDI x KKI
Kolaborasi Memacu Digitalisasi

10 SOROT

Maksimalkan Inovasi Digital
Minimalkan Risikonya

16 OPINI

BSPI 2030 dan Akselerasi Ekonomi
Keuangan Digital

20 INFOGRAFIK

Sinergi Perkuat Implementasi LCT

22 KOLOM

Perluasan LCT,
Agar Rupiah Semakin Kokoh



26 TERKINI

Ketersediaan Rupiah untuk
Kedaulatan Negara

30 TRENDING

Atasi Tantangan,
Optimalkan Potensi EKSyar



34 KIAM

Menjangkau Pasar Global
dengan Digitalisasi

38 DEDIKASI

Mempek Nabil,
Cita Rasa Palembang
Raih Sukses dari Medan

42 HISTORIA

Sumut,
Berjaya Sejak Era Kolonial

46 TRAVELISTA

Di Danau Toba
Semua Ada

50 CITA RASA

Kuliner
Legendaris Medan,
Harmoni Rasa dan Cerita



54 TAMU KITA

Lestarkan Wastra Leluhur
Berdayakan Masyarakat

58 GALERI

64 CELOTEH

65 KUIS & KRIUK!

66 FYP

Asal Klik, bisa Panik!

FOTO COVER DOK. BANK INDONESIA

• PENANGGUNG JAWAB: **RAMDAN DENNY PRAKOSO** • PEMIMPIN REDAKSI: **BAMBANG PRAMONO**
• REDAKSI PELAKSANA: **ELLY TJAN, MIRZA AFIFA, RATHI DEVI PERMATA SARI, AGUSTIARA PURBA, MIDA RATNA WINDA PUTRI, AFIF ANGGORO PRASETYO**
• KONTRIBUTOR: **DEPARTEMEN INTERNASIONAL, DEPARTEMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN, DEPARTEMEN PENGELOLAAN UANG, DEPARTEMEN EKONOMI KEUANGAN INKLUSIF DAN HIJAU, DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH, KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATRA UTARA**

KONSULTAN: **MEDIA INDONESIA PUBLISHING**
ALAMAT REDAKSI: **DEPARTEMEN KOMUNIKASI BANK INDONESIA**
JL. M. H. THAMRIN NO.2, JAKARTA PUSAT 10350
CONTACT CENTER: **(021) 131** E-MAIL: **bicara@bi.go.id**

BSPI 2030, MASA DEPAN SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

Sobat Rupiah, digitalisasi telah merambah berbagai bidang dan menjangkau hampir semua kalangan. Bank Indonesia (BI) menjadi salah satu pihak yang berperan signifikan dalam digitalisasi, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran. Dalam lima tahun terakhir, digitalisasi sistem pembayaran dilakukan dengan mengacu pada *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang diluncurkan oleh BI pada 2019.

Sejak diimplementasikan, berbagai hasil positif telah diraih, termasuk implementasi QRIS dan BI-FAST. Melanjutkan BSPI 2025, BI meluncurkan BSPI 2030 untuk membangun sistem pembayaran yang tangguh di masa depan. Seperti apa rencana kelanjutan digitalisasi pembayaran berdasarkan BSPI 2030? Simak ulasannya pada Rubrik Sorot, ya Sobat!

Di kancah internasional, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas negara atau dikenal dengan *Local Currency Transaction* (LCT). Dengan langkah ini, transaksi dengan negara mitra tidak lagi

menggunakan dolar AS. Se jauh ini, BI telah memiliki kerja sama LCT dengan 8 (delapan) negara. Indonesia juga sudah memiliki Satgas Nasional LCT yang beranggotakan 10 Kementerian/Lembaga, termasuk BI. Mengapa BI begitu gencar mendorong LCT? Apa saja manfaatnya untuk kita? Dapatkan jawabannya dengan membaca uraian di Rubrik Kolom.

Sobat, menggunakan uang Rupiah tentu sudah menjadi keseharian kita. Tapi, tahukah Sobat, selain berfungsi sebagai alat transaksi, Rupiah juga punya peran penting lainnya, yakni sebagai simbol kedaulatan negara. Mengapa demikian? Bagaimana seharusnya kita memaknai Rupiah? Simak penjelasannya di Rubrik Terkini.

Lalu, di Rubrik Trending, ada pembahasan tentang upaya peningkatan pembiayaan untuk para pelaku usaha syariah. Langkah tersebut diperlukan untuk mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah (EKSyar), sektor yang menjadi salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain topik-topik utama tersebut,

BICARA edisi ini juga menyajikan artikel-artikel ‘ringan’

seputar Sumatra Utara (Sumut). Ada pembahasan tentang wisatanya, kulinernya, juga kisah inspiratif tentang dua UMKM asal Sumut yang sukses mengembangkan usahanya.

Selamat membaca!





FEKDI x KKI

Kolaborasi Memacu Digitalisasi

FEKDI X KKI 2024 MENJADI AJANG SELEBRASI ATAS KEMAJUAN PESAT DIGITALISASI INDONESIA. KEGIATAN INI MEMPERKUAT KOMITMEN BERSAMA UNTUK AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL KE DEPAN, JUGA KOLABORASI UNTUK EKONOMI KERAKYATAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF.

Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 digelar di Jakarta Convention Center pada 1-4 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi kuat antara Bank Indonesia (BI), Pemerintah, industri sistem pembayaran dan keuangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akademisi, serta masyarakat.

Tahun ini, untuk pertama kalinya, FEKDI diadakan berbarengan dengan KKI. Acara ini merupakan penyelenggaraan FEKDI keempat (sejak 2021) dan KKI kesembilan (sejak 2016). Tujuan penyelenggaraan yang bersamaan ini antara lain untuk menunjukkan peran digitalisasi sebagai *game changer* dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, *go digital*, dan *go global*.

Dalam pembukaan FEKDI x KKI 2024, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan transformasi digital perlu terus diperkuat untuk mengakselerasi pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM. Digitalisasi pada proses produksi, pemasaran, serta pembayaran akan mendorong kemajuan UMKM di tingkat domestik dan global. Dalam hal ini, transformasi digital harus dilakukan secara inklusif, berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses dan kesempatan sama, dengan didukung aspek perlindungan konsumen.

FEKDI x KKI 2024 mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”. Kegiatan ini menjadi bagian dari selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk akselerasi transformasi digital ke depan, juga kolaborasi untuk ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan inklusif. Rangkaian acaranya mencakup *showcasing* berbagai inovasi produk digital, pameran produk UMKM premium

dan inovatif, *fashion show*, *business matching*, seminar, *talkshow*, *user experience*, serta peluncuran inisiatif digitalisasi pembayaran nasional.

Selama empat hari penyelenggaraan, FEKDI x KKI 2024 mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Hal ini tecermin dari antusiasme masyarakat dan nilai transaksi ekonominya. Forum dialog dan aktivasi yang dilakukan dari hari pertama hingga ketiga dihadiri 2.969 pengunjung dan 24.874 peserta daring melalui berbagai kanal BI. Sementara itu, pengunjung acara FEKDI x KKI mencapai 26.990 orang dan pengunjung daring mencapai 123.290 orang.

Hingga hari terakhir pameran, omzet penjualan di lokasi pameran mencapai Rp24,7 miliar dan penjualan daring sebesar Rp98,4 miliar. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan total omzet KKI tahun lalu yang sebesar Rp18,8 miliar untuk penjualan *offline* dan Rp72,4 miliar untuk penjualan *online*.

Selain itu, pada KKI 2024, nilai transaksi dari kegiatan *business matching* (BM) ekspor mencapai Rp264,7 miliar, terdiri dari realisasi ekspor dan penandatanganan kesepakatan bisnis. Pencapaian tersebut meningkat 26% jika dibandingkan dengan KKI 2023. BM ekspor mempertemukan UMKM binaan BI dan Kementerian/Lembaga yang berorientasi ekspor dengan 22 pembeli potensial dan *aggregator* ekspor dari 11 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Mesir, Hongkong, Uni Emirat Arab, Australia, Belanda, dan Prancis.

Melalui FEKDI x KKI 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo mengajak seluruh elemen pemerintahan, otoritas, asosiasi dan industri, serta masyarakat untuk terus memperkuat sinergi transformasi digital dalam memajukan ekonomi dan keuangan digital nasional, serta mendukung pengembangan UMKM.



- ▲ Presiden Joko Widodo membuka FEKDI x KKI 2024. Tahun ini merupakan yang pertama kalinya gelaran FEKDI dilakukan bersamaan dengan KKI.



- ▲ Bank Indonesia (BI) memberikan penghargaan kepada para pemenang Hackathon BI yang telah menghasilkan inovasi solusi digital berbasis *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning* untuk pengembangan ekonomi dan keuangan digital nasional. BI juga menyerahkan penghargaan untuk pemenang QRIS Jelajah Indonesia yang telah berpartisipasi dalam terobosan kampanye perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.



▶ Gubernur BI Perry Warjiyo mengajak seluruh elemen pemerintahan, otoritas, asosiasi, industri, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam memajukan ekonomi dan keuangan digital nasional, serta mendukung pengembangan UMKM.



▶ Pagelaran karya kreatif muda bertema “Wastra Masa Kini” menampilkan 30 busana *ready to wear* karya 15 desainer dari sekolah vokasi, menggunakan wastra khas daerah asal para peserta.



▶ Salah satu UMKM peserta pameran Karya Kreatif Indonesia menawarkan produk wastra berkualitas tinggi.

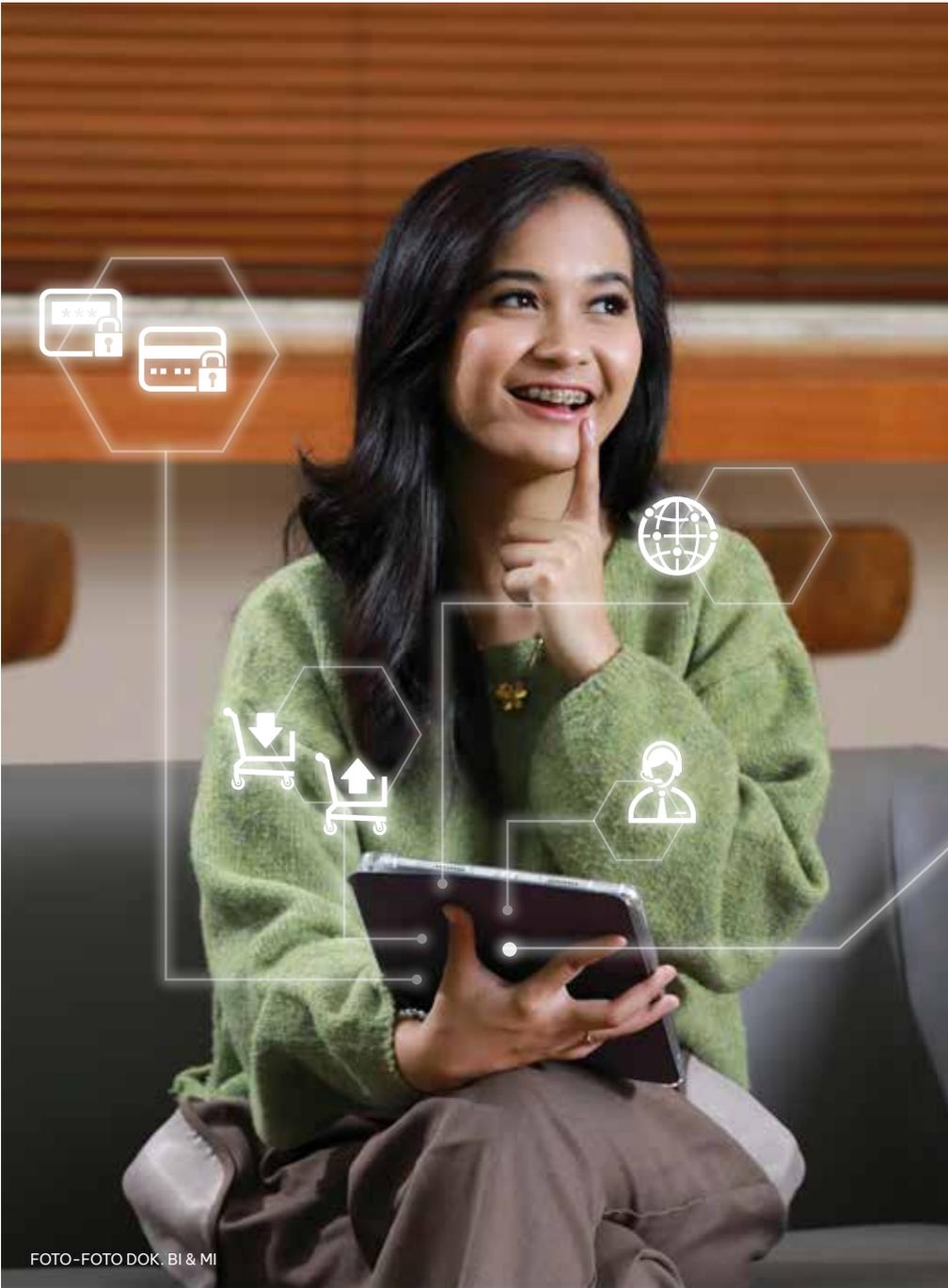


FOTO-FOTO DOK. BI & MI

Maksimalkan Inovasi Digital

MINIMALKAN RISIKONYA

DERASNYA INOVASI PEMBAYARAN DIGITAL MENJADI SALAH SATU PENDORONG PERLUASAN TRANSAKSI DIGITAL. NAMUN, KONDISI INI JUGA DISERTAI RISIKO KEJAHATAN SIBER YANG PERLU DIANTISIPASI.

Sobat Rupiah, transformasi digital nasional melaju kencang dalam lima tahun terakhir. Digitalisasi telah merambah banyak kalangan, tua dan muda, di wilayah pusat maupun daerah. Digitalisasi turut mengubah perilaku transaksi ekonomi. Masyarakat semakin terbiasa berbelanja *online* dan bertransaksi pada platform

digital. Mereka pun menuntut metode pembayaran yang serba *mobile*, cepat, dan aman.

Pada Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) di Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan potensi ekonomi digital Indonesia di masa depan. Diproyeksikan, pada 2030 ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat menjadi Rp5.800 triliun dan pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat menjadi Rp12.300 triliun. Salah satu faktor pendorongnya adalah bonus demografi, pada 2030 jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 68%, di dalamnya termasuk generasi Y (milenial), Z, dan alfa. Mereka adalah generasi yang memiliki karakteristik *digital savvy*, yang mendorong luasnya akseptasi digitalisasi.

Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan transformasi digital guna mengakselerasi pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Dalam hal ini, transformasi digital harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses dan kesempatan

sama, dengan didukung aspek perlindungan konsumen.

Untuk mendorong transformasi digital, Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang mengarahkan pengembangan ekonomi digital melalui enam pilar, yaitu (i) infrastruktur; (ii) sumber daya manusia; (iii) iklim bisnis dan keamanan siber; (iv) penelitian, inovasi, dan pengembangan bisnis; (v) pendanaan dan investasi; serta (vi) kebijakan dan regulasi. Pada tingkat regional, Indonesia menginisiasi *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yang telah disepakati pada Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 untuk memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.

Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan kemajuan pesat telah dicapai Indonesia dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Hal ini tecermin dari peningkatan *World Digital Competitiveness Ranking*, dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi ke-45 pada 2023. Indonesia juga menduduki peringkat pertama di ASEAN dan peringkat ke-6 di global dalam daftar negara dengan *startup* inovatif terbanyak.



BSPI 2030 Menjawab Tantangan

Transformasi digital nasional membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia (BI). Terkait hal ini, BI memiliki peran yang sangat vital, terutama di bidang digitalisasi pembayaran. Sebagai pintu masuk yang membentuk tren digitalisasi, digitalisasi pembayaran jelas berperan sentral.

Selama ini, BI mendorong kemajuan sistem pembayaran melalui *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Upaya-upaya yang dilakukan sejak 2019 telah berbuah positif. Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menyebut, BSPI 2025 terbukti menjadi *game changer* bagi transformasi digital nasional yang membantu perekonomian untuk *leap frogging*.

Ia menjelaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan digital melalui BSPI 2019–2025 telah mencatatkan beberapa pencapaian, antara lain besarnya jumlah pengguna QRIS yang sebagian besar ialah UMKM, transaksi BI-FAST yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, Kartu Kredit Indonesia yang mendukung kelancaran transaksi keuangan Pemerintah, dan reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional.

Tren pembayaran nontunai pun kian mendominasi. Dalam lima tahun terakhir, transaksi ritel melalui *digital banking*, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik meningkat signifikan dengan nilai transaksi mencapai Rp244.673 triliun. Sementara itu, pengguna dan *merchant* QRIS sampai Juni 2024 masing-masing mencapai 50,5 juta pengguna dan 32,71 juta *merchant*.

Ke depan, penggunaan transaksi digital diperkirakan semakin meluas, didorong oleh tiga faktor. Pertama, menguatnya partisipasi ekonomi generasi milenial, Z, dan alfa. Kedua, inovasi pembayaran digital yang semakin deras dengan berfokus pada

kebutuhan dan preferensi konsumen (*consumer centric*). Ketiga, interkoneksi transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara yang semakin menguat.

Kondisi tersebut memunculkan tantangan yang hanya dapat direspons oleh konstruksi sistem pembayaran nasional yang berdaya tahan dalam struktur yang konsolidatif. Oleh karena itu, BI merumuskan BSPI 2030 sebagai jawaban atas tantangan tersebut.

BSPI 2030 merupakan kelanjutan dari BSPI 2025 sekaligus menjadi wujud komitmen BI dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Amanat tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) sasaran kebijakan yang bermuara pada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu:

- i) Transaksi dan Velositas, berupa transaksi sistem pembayaran ritel dan wholesale yang cepat, mudah, dan murah sehingga transaksi ekonomi dan keuangan dapat berputar secara lebih efisien, sehingga mendorong produktivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- ii) Struktur, berupa struktur industri jasa sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif dengan manajemen risiko yang kuat serta praktik pasar yang efisien dan wajar.
- iii) Infrastruktur, berupa infrastruktur yang stabil, modern, aman, sesuai standar internasional, dan memenuhi aspek 3i (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi), baik bagi infrastruktur yang diselenggarakan BI maupun infrastruktur yang diselenggarakan oleh industri.

Selain itu, untuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional ke depan, BSPI 2030 memiliki 5 (lima) inisiatif utama. **Pertama**, mencapai infrastruktur yang berdaya tahan dan terintegrasi. Inisiatif ini diturunkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) sub inisiatif, yaitu i) infrastruktur pembayaran ritel,

ii) infrastruktur sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*), dan iii) infrastruktur data.

Kedua, menata struktur industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan menjamin fungsi pengedaran uang oleh bank sentral. Ketiga, membangun kolaborasi antara BI dengan industri dalam mendorong inovasi dan akseptasi secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas, dan persaingan usaha yang sehat.

Keempat, mendorong interkoneksi lintas negara beserta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. **Kelima**, pengembangan rupiah digital yang diarahkan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar *wholesale* dan pendalaman pasar keuangan.

Penguatan Manajemen Risiko

Sobat Rupiah, seperti yang disebutkan di awal, dasarnya inovasi pembayaran digital menjadi salah satu pendorong perluasan transaksi digital. Di satu sisi, hal ini menguntungkan bagi percepatan transformasi digital nasional. Namun, kondisi ini juga disertai risiko, antara lain berupa tindak kejahatan siber, termasuk

fraud dan penyalahgunaan data, yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Bila tidak direspons dengan benar, hal itu akan menggerus kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat laju digitalisasi itu sendiri.

Tak pelak, pesatnya perkembangan inovasi teknologi menjadi tantangan bagi bank sentral, yakni bagaimana mengadopsi keunggulan inovasi tersebut sekaligus memitigasi risikonya guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait dengan hal itu, dalam ajang FEKDI x KKI 2024, Deputy Gubernur BI Doni P. Joewono mengatakan, laju inovasi yang cepat perlu diimbangi dengan manajemen risiko, termasuk penguatan keamanan sistem serta prinsip KYC (*Know Your Customer*) dan KYM (*Know Your Merchant*). Di sisi otoritas, penguatan harmonisasi kebijakan dan pengaturan perlindungan konsumen perlu terus dilakukan.

Oleh karena itu, BSPI 2030 memperkokoh manajemen risiko guna membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) hal utama. **Pertama**, mendorong





peran aktif masyarakat, tidak hanya sebagai pengguna tapi juga paham terhadap risiko transaksi digital seperti ancaman siber dan *fraud*, melalui program peningkatan serta pemerataan tingkat literasi digital nasional dan daerah.

Kedua, dukungan dari industri dan asosiasi dalam membentuk ekosistem digital, dengan mengedepankan inovasi dan investasi teknologi pengamanan infrastruktur yang berlapis, untuk menangkal ancaman siber yang kian kompleks. **Ketiga**, sinergi dan kolaborasi yang kuat antarotoritas, Kementerian/Lembaga, dan tentunya industri serta asosiasi, termasuk dalam menghasilkan regulasi yang adaptif dan melindungi masyarakat.

Dengan manajemen risiko yang kuat, diharapkan peran transaksi digital dalam menopang pemulihan ekonomi semakin terakselerasi.

Literasi dan Pelindungan Konsumen

Senada, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta pada acara *Leader's Insight Casual Talk FEKDI x KKI* menyampaikan, derasnya laju digitalisasi perlu diimbangi dengan

literasi dan pelindungan konsumen dalam kecepatan yang sama untuk memitigasi masifnya serangan siber. Sejalan dengan hal itu, pada inisiatif infrastruktur dalam BSP1 2030, BI akan mengembangkan BI-*Payment Clear* sebagai skema untuk memperkuat kapasitas industri dan manajemen risiko.

Lebih lanjut, industri sistem pembayaran dituntut memperkuat TIKMI (teknologi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi) yang akan mendukung terciptanya ekonomi-keuangan digital yang andal. Lalu, pada inisiatif inovasi, akseptasi digital yang telah berjalan akan dilanjutkan dan diperkuat melalui program literasi digital.

Sobat Rupiah, peran kolaboratif berbagai pihak, termasuk regulator, industri, akademisi, dan konsumen memang sangat diperlukan dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi peluang baru serta mengatasi tantangan yang muncul, sehingga inovasi ekonomi dan keuangan digital dapat berjalan seiring dengan manajemen risiko dan pelindungan konsumen yang memadai.



FOTO SHUTTERSTOCK

BSPI 2030 DAN AKSELERASI EKONOMI KEUANGAN DIGITAL

BLUEPRINT SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 2030 DIYAKINI AKAN MENDORONG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, EFISIENSI EKONOMI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030) yang disusun oleh Bank Indonesia (BI) merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital nasional dan merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di era digital. *Blueprint* ini dapat dipandang sebagai upaya yang tepat dan relevan dengan kondisi perekonomian serta perilaku masyarakat Indonesia saat ini.

Pertama, BSPI 2030 secara jelas merespons perkembangan demografi Indonesia. Saat ini, struktur demografi Indonesia didominasi oleh generasi milenial, Z, dan alfa yang cenderung *digital savvy*. Dalam konteks ekonomi, generasi ini mengubah cara bertransaksi dan berbisnis. Mereka lebih memilih

PENULIS:

Ibrahim Kholilul Rohman

- Senior Research Associate IFG Progress
- Dosen di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia

Muhammad Firdaus Al Farohi

- Research Intern IFG Progress

metode pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta memiliki preferensi yang tinggi terhadap teknologi digital. Berdasarkan data BPS tahun 2020, sekitar 53,8% populasi Indonesia berada dalam usia produktif dan diproyeksikan akan semakin meningkat hingga tahun 2030.

Kedua, inovasi digital yang semakin deras juga menjadi pendorong utama perubahan sistem pembayaran di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul berbagai inovasi pembayaran, seperti QRIS yang berkembang pesat dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah *merchant* 32,71 juta, serta inovasi lain seperti Standar Nasional *Open Application Programming Interface* (API) Pembayaran atau

SNAP. Ini mencerminkan upaya yang berfokus pada *consumer-centric*, yaitu memudahkan masyarakat melakukan transaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Lebih jauh, BSPI 2030 juga menyoroti peningkatan konektivitas lintas negara dalam pembayaran digital sebagai respons terhadap perkembangan global. Pembayaran lintas negara yang lebih efisien dan terintegrasi telah menjadi agenda internasional, terutama dengan adanya komitmen forum G20. Indonesia turut berperan dalam meningkatkan efisiensi pembayaran antar negara, yang diwujudkan melalui kerangka kerja *Regional Payment Connectivity* di ASEAN. Interkoneksi ini fokus pada interoperabilitas QR, pembayaran cepat (*fast payments*), standarisasi API, interkoneksi RTGS, dan kerangka data konektivitas antarsistem pembayaran.

Dampak dari implementasi BSPI 2030 terhadap perekonomian Indonesia diproyeksikan sangat positif. Dengan digitalisasi sistem pembayaran, akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih inklusif dan efisien. Hal ini selaras dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bergeser ke transaksi digital. Proyeksi menunjukkan, volume transaksi transfer dana ritel secara daring akan tumbuh hingga 14 kali lipat pada 2030 (dibandingkan dengan 2023), mencapai 10,05 miliar transaksi. Pertumbuhan ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat dari penggunaan uang tunai ke transaksi digital yang lebih efisien dan mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari. Akses yang lebih mudah dan murah terhadap layanan keuangan digital akan mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Aspek lain yang harus dipertimbangkan ialah rencana negara-negara ASEAN secara bersama-sama mengimplementasikan *ASEAN Digital Economic Framework Agreement* (DEFA). Inisiatif ini digadang-gadang

akan memberikan dampak ekonomi sebesar 2 triliun dolar AS sampai tahun 2030 dengan meletakkan peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembentukan nilai ekonomi. Namun demikian, di tengah keterbatasan adopsi teknologi oleh UMKM di Indonesia, kekhawatiran bahwa DEFA memberikan dampak yang tidak optimal bagi Indonesia perlu diwaspadai.

Karena itu, salah satu dampak penting lainnya dari BSPI 2030 ialah perannya dalam mendukung UMKM dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan digital, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan mengakses pasar yang lebih luas. Selain itu, biaya transaksi yang terjangkau akan mendorong adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional.

Antisipasi Risiko

Namun, digitalisasi sistem pembayaran juga memiliki potensi tantangan yang perlu diatasi, seperti risiko siber dan ancaman *fraud*. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, potensi serangan siber dan kebocoran data menjadi perhatian utama. Risiko siber ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital dan berpotensi menghambat laju digitalisasi itu sendiri. Oleh karena itu, BSPI 2030 menekankan pentingnya BI dan pelaku industri membangun infrastruktur yang tangguh, sinergis, dan memiliki manajemen risiko kuat.

Tantangan lainnya adalah fragmentasi industri antara bank dan pelaku nonbank, seperti *fintech*. Digitalisasi perbankan yang berkembang pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan interkoneksi yang kuat antara bank dan pelaku nonbank. Hal ini meningkatkan risiko *shadow banking*, yaitu aktivitas keuangan yang terjadi di luar regulasi

perbankan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penguatan *interlink* antarpelaku industri, sehingga risiko dapat dikendalikan secara lebih efektif. Dalam hal ini, BSPI 2030 mendorong agar regulasi dan standar teknis yang diterapkan mampu menjaga integritas dan stabilitas sistem pembayaran tanpa menghambat inovasi.

Sejalan dengan risiko tersebut, aspek literasi digital masyarakat juga menjadi kunci penting dalam keberhasilan implementasi BSPI 2030.

Langkah Strategis

Untuk memaksimalkan keberhasilan BSPI 2030, beberapa langkah strategis perlu diambil. **Pertama**, penguatan infrastruktur digital harus menjadi prioritas. Hal ini melihat kesiapan infrastruktur digital yang belum memadai, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses internet atau teknologi finansial yang optimal. Meskipun penetrasi internet terus meningkat, kualitas dan stabilitas koneksi, terutama di daerah pelosok, masih menjadi masalah serius. Tanpa infrastruktur yang kuat, tujuan digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif dan efisien sulit dicapai.

Kedua, kolaborasi antara sektor perbankan dan *fintech* harus terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih inklusif dan terintegrasi. Dalam hal ini, peran regulator seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang kolaboratif akan membantu mengatasi risiko *shadow banking* dan fragmentasi industri.

Ketiga, peningkatan literasi keuangan digital di masyarakat harus dilakukan secara masif. Saat ini, masih

banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman cukup mengenai layanan keuangan digital. Hasil survei



Status Literasi Digital Indonesia 2022 yang dilakukan Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center menunjukkan literasi digital masyarakat Indonesia yang diukur berdasarkan kecakapan digital (*digital skills*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*) berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan digital sangat diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan layanan pembayaran digital secara bijak dan aman. Selain itu, peningkatan literasi ini juga akan mendorong inklusi keuangan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

Sebagai penutup, regulasi yang didesain untuk mendukung inovasi dan keamanan sistem pembayaran perlu terus dikembangkan. Pengembangan standar teknis yang terbuka, *interoperable*, dan sesuai dengan praktik internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem pembayaran. Penggunaan teknologi *regtech* dan *supotech* dapat membantu dalam pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap aktivitas keuangan digital.

SINERGI PERKUAT IMPLEMENTASI LCT

Bank Indonesia bersama 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nasional *Local Currency Transaction* (LCT) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional LCT pada Kamis, (29/8). Penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen kerjasama dan koordinasi mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional.

LCT

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara.

NEGARA MITRA (EXISTING)

-  Malaysia (sejak 2018)
-  Thailand (sejak 2018)
-  Jepang (sejak 2020)
-  Tiongkok (sejak 2021)
-  Korea Selatan (sejak 2024)

NEGARA MITRA BARU

-  Singapura (MoU 2022)
-  India (MoU 2024)
-  Uni Emirat Arab (MoU 2024)



ANGGOTA SATGAS LCT

- Bank Indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Otoritas Jasa Keuangan
- Lembaga Penjamin Simpanan

SINERGI SATGAS NASIONAL LCT

1. Koordinasi dan kerja sama dalam mendorong pelaku usaha agar meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.
2. Koordinasi dan kerja sama mendorong penggunaan mata uang lokal pada area perbankan dan pasar keuangan.
3. Koordinasi dan kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antarnegara.



PANGSA TRANSAKSI LCT TERHADAP TOTAL PERDAGANGAN

TAHUN 2023

5,73%

SEMESTER I 2024

7,89%

NILAI TRANSAKSI LCT

6,29

MILIAR DOLAR AS



TOTAL TRANSAKSI LCT PADA 2023

4,70

MILIAR DOLAR AS



TRANSAKSI SEMESTER I 2024



FOTO-FOTO DOK. BI

PERLUASAN LCT, AGAR RUPIAH SEMAKIN KOKOH

SEJUMLAH NEGARA MULAI MELAKUKAN DIVERSIFIKASI MATA UANG UNTUK PEMBAYARAN TRANSAKSI EKONOMI DAN KEUANGAN LINTAS BATAS MELALUI PENGGUNAAN MATA UANG LOKAL. PENGGUNAAN MATA UANG LOKAL DI INDONESIA DIINISIASI OLEH BANK INDONESIA MELALUI SKEMA *LOCAL CURRENCY TRANSACTION* (LCT), YAITU PENGGUNAAN MATA UANG LOKAL DALAM TRANSAKSI LINTAS BATAS. HINGGA SAAT INI, BI TELAH MENJALIN KERJA SAMA LCT DENGAN DELAPAN NEGARA.



Sobat Rupiah, transaksi lintas batas negara, seperti impor dan ekspor, menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari. Bahkan, dari waktu ke waktu, jenis dan volume ekspor/impor terus bertambah, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat negara-negara di dunia. Sejak lama, transaksi lintas negara umumnya menggunakan mata uang yang diterima di banyak negara (*hard currency*), seperti dolar Amerika Serikat (AS), euro, dan poundsterling.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, sebab fluktuasi nilai *hard currency* dapat mengusik stabilitas Rupiah, hingga berimbas negatif pada perekonomian domestik. Sehingga, diversifikasi penggunaan mata uang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko volatilitas *hard currency* tersebut.

Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia bersama sejumlah negara berinisiatif menggunakan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, yang dikenal dengan skema *Local Currency Transaction* (LCT). Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif mendorong perluasan implementasi LCT dengan menggandeng sejumlah negara mitra. Bahkan, di bawah keketuaan Indonesia, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta menghasilkan kesepakatan percepatan pembayaran lintas batas di ASEAN yang di dalamnya mencakup penerapan LCT.

Selain mendukung kegiatan ekspor dan impor, implementasi LCT diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui QR *cross border*, dan memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga di masa mendatang. Lebih lanjut, implementasi LCT diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar.

Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) bersama 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga lainnya sepakat membentuk Satgas Nasional LCT. Satgas ini menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar-K/L dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra.

Di level internasional, dalam pertemuan *Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks* (EMEAP) ke-29 di Malaysia pada Juli 2024, Gubernur Bank Indonesia (BI)



Perry Warjiyo kembali menekankan pentingnya mendorong penerapan LCT sebagai upaya pendalaman pasar keuangan, mengurangi volatilitas nilai tukar, dan membentuk efisiensi harga. Ia menyebutkan, sejauh ini, inisiatif LCT di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif sejak awal implementasi di 2018. Hal itu terlihat dari peningkatan volume transaksi dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi, serta pembentukan harga yang semakin efisien. Total transaksi LCT pada semester I 2024 mencapai 4,7 miliar dolar AS atau telah mencapai 75% total transaksi LCT sepanjang tahun 2023 yang sebesar 6,29 miliar dolar AS. Pangsa transaksi LCT terhadap total perdagangan dengan negara mitra pada semester I 2024 mencapai 7,89%, meningkat dari pangsa tahun sebelumnya yang sebesar 5,73%.

Dalam forum yang dihadiri para gubernur bank sentral se-Asia Pasifik itu, Gubernur Perry pun memaparkan tiga upaya penting dalam meningkatkan implementasi LCT, yaitu: (i) mendorong ekosistem yang memadai dengan cakupan partisipan, produk, harga, dan infrastruktur; (ii) memperkuat peran aktif otoritas dalam mendorong terciptanya ekosistem LCT yang optimal serta mengembangkan pasar keuangan dalam mata uang lokal; dan (iii) mempererat sinergi antarotoritas baik domestik

maupun di negara mitra. Saat ini, BI telah memiliki kerja sama LCT dengan 8 (delapan) negara, 6 (enam) di antaranya merupakan negara anggota EMEAP. Delapan negara itu terdiri dari lima negara mitra *existing*, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan (Korsel), serta tiga negara mitra baru, yaitu Singapura, India, dan Uni Emirat Arab (UEA). Ditargetkan, kerja sama LCT dengan Singapura dan UEA diimplementasikan pada 2024, sedangkan India pada 2025.

Kerja Sama dengan Korsel

Kerangka LCT Indonesia dan Korsel akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024. Sebelumnya, pada 30 Agustus 2024 BI, Bank of Korea (BOK), dan Kementerian Keuangan Korsel menyepakati kerangka kerja sama LCT dalam mendorong penggunaan mata uang lokal, Rupiah dan Won, untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korsel. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024.

Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korsel ini merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara. Kerangka LCT akan memperkuat



interkoneksi bank *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*, yaitu bank yang berfungsi memfasilitasi transaksi berjalan antarnegara dengan menggunakan mata uang lokal. Kerja sama ini juga mendorong kuota nilai tukar secara langsung (*direct quotation*) antara Rupiah terhadap Won serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT. Implementasi kerangka LCT akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, dan diyakini dapat mengurangi eksposur risiko nilai tukar, serta meningkatkan efisiensi transaksi.

Sebelumnya, pada Juli 2024, BI dengan BoK telah menyepakati kerja sama terkait pembayaran berbasis QR code. Kerja sama tersebut akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR

IMPLEMENTASI KERANGKA LCT AKAN MENDORONG PENINGKATAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL, DAN DIYAKINI DAPAT MENGURANGI EKSPOSUR RISIKO NILAI TUKAR, SERTA MENINGKATKAN EFISIENSI TRANSAKSI.

code antara kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran.

Kerja sama pembayaran berbasis QR code tersebut bertujuan untuk mengakselerasi interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QRIS dan QR code pembayaran Korsel yang akan ditentukan oleh BoK. Kesepakatan itu tentunya dapat mendukung transaksi masyarakat kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korsel.

Gandeng Uni Emirat Arab

Sementara itu, kerja sama dengan UEA dirintis melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk membentuk kerangka kerja penguatan kerja sama bilateral di area sistem pembayaran. MoU ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral UEA (CBUAE) Khaled Mohamed Balama pada Juli lalu. Sebelumnya, penandatanganan MoU pun telah dilakukan pada 29 November 2023 yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital. MoU ini juga melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui kerangka LCT.

Melalui kesepakatan tersebut, kerja sama LCT yang akan diimplementasikan pada tahun ini memiliki prospek menjanjikan untuk mendorong peluang bisnis yang lebih besar, serta mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi.

Sobat Rupiah, itulah gambaran upaya BI dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan LCT. Diharapkan, kerja sama LCT dengan banyak negara mitra dapat berkontribusi signifikan pada upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah di tengah ketidakpastian perekonomian global.



KETERSEDIAAN RUPIAH
UNTUK
KEDAULATAN
NEGARA

FOTO-FOTO DOK. BI



PERAN RUPIAH TIDAK HANYA TERBATAS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN, TETAPI JUGA SEBAGAI SIMBOL KEDAULATAN NEGARA. RASA CINTA, BANGGA, DAN PAHAM RUPIAH PERLU DITANAMKAN DALAM DIRI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA.

Sobat Rupiah, penggunaan uang Rupiah untuk pembayaran berbagai keperluan menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi, tahukah Sobat bahwa di balik fungsinya sebagai alat pembayaran, Rupiah juga menjadi simbol kedaulatan negara kita?

Konsiderans UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) secara tegas menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.”

Mengutip buku *Rupiah untuk Kedaulatan Negara* yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan uang dan kedaulatan saling berkait erat. Keduanya bahkan tidak terpisahkan satu sama lain. Tidak ada negara berdaulat secara utuh tanpa pemilikan mata uang sendiri.

Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, menampilkan gambar Pahlawan Nasional dan lambang negara Burung Garuda serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Symbolisme ini agar masyarakat dapat terilhami dalam memaknai Rupiah, sehingga melahirkan rasa cinta, bangga, dan paham menggunakannya dengan bijaksana.

Sobat Rupiah, maraknya peredaran mata uang asing dalam satu wilayah tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat mempengaruhi sentimen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi. Peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang salah satunya diakibatkan oleh dominasi penggunaan

mata uang ringgit Malaysia sebagai alat pembayaran menjadi bukti nyata betapa Rupiah berperan vital dalam menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, BI sebagai bank sentral yang bertanggungjawab dalam mengedarkan Rupiah selalu memastikan Rupiah layak edar selalu tersedia hingga ke pelosok Nusantara.

Setidaknya, ada tiga tantangan utama bagi BI dalam mengedarkan Rupiah. **Pertama**, kondisi geografis NKRI yang terdiri dari ribuan pulau dengan keterbatasan infrastruktur. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam mendistribusikan dan menjaga ketersediaan Rupiah, terutama di wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T). **Kedua**, variasi tingkat pendidikan masyarakat sehingga mempengaruhi cara memperlakukan uang. **Ketiga**, penggunaan mata uang selain Rupiah sebagai alat pembayaran.

Namun, BI menjawab tantangan ini dengan dedikasi tinggi untuk mengembangkan sistem distribusi yang inklusif dan adaptif guna menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan Rupiah. Upaya tersebut dilakukan BI bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti TNI-AL, Polri, Pos Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Daerah. Beberapa kegiatan yang dijalankan antara lain Ekspedisi Rupiah Berdaulat untuk mengedarkan uang di wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T), Kas Keliling, Kas Titipan, dan kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah.

CBP Rupiah

Kampanye CBP Rupiah dilakukan BI melalui sejumlah program, salah satunya ialah penyelenggaraan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2024. Festival yang ketiga kalinya digelar ini mengangkat tema “Rupiah, Ambassador of Indonesia” yang bermakna Rupiah menjadi cerminan keragaman Indonesia

untuk memperteguh persatuan dan nasionalisme. FERBI 2024 di selenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada 16-18 Agustus 2024, bertepatan dengan momen HUT ke-79 RI.

Dalam acara pembukaan, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pentingnya masyarakat memahami CBP Rupiah. **Pertama**, Rupiah adalah mata uang simbol kedaulatan negara yang harus dijaga dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia (Cinta). **Kedua**, Rupiah menunjukkan identitas dan simbol negara yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan frasa NKRI (Bangga). **Terakhir**, Rupiah adalah jendela Indonesia, melalui desain uang Rupiah kita bisa melihat perjalanan sejarah bangsa, keragaman budaya dan kekayaan bangsa (Paham).

Bagaimana langkah-langkah mengimplementasikan CBP Rupiah? Gubernur Perry menjelaskan, kecintaan terhadap Rupiah dapat diwujudkan dengan mengenali karakteristik dan desain Rupiah, memperlakukan Rupiah secara tepat, dan menjaga Rupiah dari kejahatan uang palsu. Jadi, Cinta Rupiah diwujudkan dengan cara mengenali, merawat, dan menjaga Rupiah. BI sendiri senantiasa menjaga kualitas dan keamanan Rupiah dengan penggunaan unsur pengaman dan teknologi terkini agar Rupiah semakin mudah dikenali oleh masyarakat, menyulitkan pemalsuan, dan memiliki usia edar yang lebih lama.

Lalu, menumbuhkan kebanggaan terhadap Rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta memahami bahwa Rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan alat persatu bangsa. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan



di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Terakhir, terkait Paham rupiah, Sobat perlu memahami peran Rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan alat penyimpan nilai kemampuan. Gunakan Rupiah secara bijak untuk bertransaksi, berbelanja, dan berhemat sesuai kemampuan.

Buku *Rupiah untuk Kedaulatan Negara*

Sobat Rupiah, pembahasan di awal telah menyinggung buku *Rupiah untuk Kedaulatan Negara*. Buku ini diluncurkan di acara FERBI 2024. Buku ini mengungkap fakta historis melalui uraian kronologis tentang Rupiah, serta merangkai kolase peran BI yang berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam mendekatkan Rupiah kepada masyarakat.

Secara garis besar, buku ini selain menawarkan kebaruan dan keunikan dari sebuah pengetahuan, juga menyiratkan kebijaksanaan. Diharapkan, buku ini dapat memberikan referensi literasi masyarakat mengenai sejarah dalam menegakkan Rupiah sebagai mata uang RI, simbol kedaulatan negara, serta semakin menumbuhkan rasa CBP Rupiah.

Selain peluncuran buku, kegiatan FERBI mencakup Dialog Kebangsaan bertajuk Indonesia Maju dengan narasumber keluarga pahlawan nasional, inspirator bidang pendidikan, serta pemangku kebijakan di daerah perbatasan NKRI. Diskusi antartokoh ini mengeksplorasi pesan sikap bersatu dari masing-masing bidang dalam kerangka kebinekaan sebagaimana tecermin dalam Rupiah, serta pemaknaan Indonesia dalam memperkokoh semangat nasionalisme serta karakter bangsa.

FERBI 2024 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti ekshibisi “Rupiah, Ambassador of Indonesia”, layanan penukaran uang Rupiah logam dan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI pecahan Rp75.000, lomba CBP Rupiah, ragam permainan HUT ke-79 RI, serta hiburan panggung Rupiah.

Sobat Rupiah, ke depan, BI akan terus memperkuat upaya agar masyarakat bisa lebih dekat dengan Rupiah sehingga kebermanfaatannya baik secara praktis maupun ideologis mampu bertahan di tengah perubahan yang semakin cepat dengan digitalisasi di era informasi. Mari, kita dukung dengan memupuk semangat Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah!



FOTO DOK. MI

ATASI TANTANGAN, Optimalkan Potensi EKSyar

EKSYAR DIHARAPKAN MENJADI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU YANG SOLID, INKLUSIF, *SUSTAINABLE*, DAN *IMPACTFUL* UNTUK KEMASLAHATAN MASYARAKAT.

Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (EKSyar) di Indonesia menunjukkan capaian positif. Hal ini antara lain tecermin dari laporan *State of The Global Islamic Economy Report 2023* yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Economy Score 2023*. Pencapaian ini menjadi pemacu bagi berbagai pihak untuk terus mengembangkan EKSyar Tanah Air. Mengingat, Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki banyak potensi di sektor EKSyar.

Secara umum, terdapat tiga tantangan utama pengembangan EKSyar nasional. **Pertama**, industri syariah dihadapkan pada tantangan terkait produksi serta ketersediaan dan kualitas bahan baku halal, salah satunya karena kurangnya standarisasi dalam sertifikasi halal di berbagai negara. Hal ini berpotensi menghambat ekspor produk halal

karena perbedaan standar dan regulasi. Selain itu, banyak pelaku industri kecil dan menengah yang belum memenuhi standar internasional, sehingga mengurangi daya saing produk mereka di pasar global.

Kedua, sektor keuangan syariah menghadapi tantangan signifikan, antara lain perlunya inovasi dalam model bisnis untuk menarik lebih banyak nasabah/investor, perluasan basis investor, serta infrastruktur teknologi untuk memperluas akses dan efisiensi.

Ketiga, literasi EKSyar yang masih menjadi PR bersama. Berdasarkan hasil *tracking* Survei Literasi EKSyar Nasional 2023, tingkat literasi EKSyar nasional masih berada di angka 28,01%. Diperlukan usaha ekstra untuk mencapai target 50% pada 2025, sebagaimana arahan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia (BI), khususnya dimotori oleh Departemen

Ekonomi dan Keuangan Syariah, terus berinovasi dalam menjalankan program pengembangan EKSyar. EKSyar sendiri menjadi salah satu kebijakan pendukung BI untuk melaksanakan mandat, khususnya dalam mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Inklusi itu tecermin pada upaya BI secara kolaboratif mendorong (i) pemerataan akses keuangan, (ii) kesempatan hidup yang lebih layak melalui dorongan keuangan sosial, serta (iii) kesempatan berusaha melalui program pemberdayaan pelaku usaha syariah. Meminjam istilah Wapres, BI menjadi *hamzah washol* (katalis) pengembangan EKSyar di Indonesia.

Terdapat 5 (lima) langkah kunci pengembangan EKSyar yang dilakukan BI. **Pertama**, penguatan industri syariah, terutama di sektor unggulan yaitu *halal food*, *modest fashion*, dan pariwisata ramah muslim. **Kedua**, akselerasi keuangan sosial dan komersial syariah melalui pengembangan pasar uang syariah, inovasi produk keuangan untuk mendukung pembiayaan syariah, termasuk *piloting Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengembangan *blended finance* (komersial dan sosial) seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk pembiayaan usaha mikro, serta sinergi Pemerintah, OJK, dan industri untuk menyiapkan fungsi bank syariah sebagai nazir (pengurus benda wakaf).

Ketiga, optimalisasi digitalisasi EKSyar secara *end-to-end* untuk penguatan *halal traceability* dan digitalisasi keuangan sosial syariah melalui pengembangan aplikasi SatuWakaf. **Keempat**, peningkatan literasi dan perluasan jangkauan edukasi EKSyar. BI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjalankan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi EKSyar, perluasan jangkauan edukasi melalui *omni channel*, serta

penyelenggaraan festival EKSyar untuk memperkuat *halal lifestyle*.

Kelima, BI memegang peranan penting dalam industri keuangan syariah internasional melalui posisinya sebagai *leading country* dalam International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kedua organisasi ini berperan vital dalam pengembangan dan stabilitas keuangan syariah di tingkat global. Kepemimpinan BI di kedua lembaga tersebut menguatkan posisi Indonesia sebagai negara berpengaruh dalam pengembangan ekonomi syariah global.

Bulan Pembiayaan Syariah 2024

Salah satu dukungan penting yang diperlukan untuk mengembangkan EKSyar ialah perluasan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha syariah. Pembiayaan yang memadai dari lembaga keuangan syariah diperlukan agar usaha-usaha syariah dapat terus tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, BI berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, KNEKS, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Badan Wakaf Indonesia kembali menyelenggarakan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2024. Tahun ini, BPS mengusung tema “Akselerasi Pembiayaan Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dalam peluncuran BPS 2024 beberapa waktu lalu, Deputy Gubernur BI Judo Agung menyampaikan, pembiayaan syariah pada Mei 2024 tumbuh tinggi mencapai 14,07% (yoy), lebih tinggi dari pembiayaan konvensional yang tumbuh 12,15% (yoy). Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator ekspansi sektor EKSyar.

Untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan syariah, diperlukan dukungan strategi yang difokuskan

pada tiga hal. **Pertama**, peningkatan inklusi melalui *Project Charter*. Program ini merupakan salah satu pembaruan dalam BPS 2024 yang belum ada di tahun sebelumnya. *Project Charter* ini diformulasikan oleh BI bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap UMKM dengan menysasar sektor ekonomi kreatif dan pesantren. Tujuannya, agar program pembiayaan lebih terarah untuk sektor produktif. Dalam program ini, berbagai *business matching* akan dilakukan dengan menysasar sektor ekonomi kreatif dan pesantren (*islamic ecosystem*).

Kedua, peningkatan inovasi, salah satunya melalui digitalisasi *business matching* menggunakan *platform* pembiayaan/pendanaan syariah terintegrasi untuk pembiayaan komersial syariah dan *platform* SatuWakaf Indonesia. **Ketiga**, peningkatan inisiatif bersama melalui sinergi antarlembaga dan industri jasa keuangan syariah agar dampak yang dihasilkan semakin besar bagi pengembangan keuangan syariah ke depan.

Rangkaian kegiatan BPS 2024 berlangsung dengan periode yang lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Diawali di Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatra pada Mei lalu, dilanjutkan dengan FESyar Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI), FESyar Regional Jawa, hingga mencapai puncaknya nanti pada gelaran *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024*.

Penguatan Digitalisasi

Di sisi lain, kontribusi digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan EKSyar yang inklusif dan berkelanjutan terus diperkuat. BI berkomitmen membangun ekosistem riset yang andal dan mengadopsi keunggulan digital untuk mendorong terobosan inovasi kebijakan EKSyar ke depan. Untuk memperkuat digitalisasi ekonomi dan keuangan sesuai prinsip

syariah, Gubernur Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan 3 (tiga) hal penting.

Pertama, memperkuat aspek kewirausahaan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah, dengan mengembangkan industri halal melalui digitalisasi proses sertifikasi halal dan memfasilitasi *e-commerce* untuk penjualan produk halal, mendorong tumbuhnya *crowdfunding* syariah, serta penguatan *data analytics* dan *market research* untuk perumusan kebijakan strategis.

Kedua, berorientasi bagi kemanfaatan masyarakat luas melalui pengembangan inklusi keuangan melalui perluasan akses kepada lembaga keuangan Islam menggunakan platform digital dan penguatan program literasi digital. **Ketiga**, mendorong adopsi dan adaptasi teknologi serta inovasi digital melalui pengembangan produk dan jasa keuangan syariah berbasis digital dengan memanfaatkan *artificial intelligence (AI)* and *machine learning (ML)*.

Sobat Rupiah, itulah sejumlah upaya yang dilakukan BI bersama mitra terkait untuk memajukan sektor EKSyar. Harapannya, EKSyar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang solid, inklusif, *sustainable* dan *impactful* dalam memberikan maslahat kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan Deputy Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, pada pembukaan FESyar Jawa 2024 beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, jangan lupa kunjungi gelaran *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* pada 30 Oktober-3 November 2024 di Jakarta Convention Center. Agendanya beragam, mulai dari pameran produk halal, *muslim travel fair*, *Islamic education fair*, festival kuliner halal, *business matching* dan *financing deals*, IN2MF, IN2HCC, *talkshow*, kajian harian dan tablig akbar, serta ISEF *Family Run*. Informasi lebih lengkap dapat Sobat simak di kanal media sosial BI dan ISEF.



FOTO-FOTO DOK. BI

MENJANGKAU PASAR GLOBAL DENGAN

Digitalisasi

DI ERA DIGITAL SAAT INI, DIGITALISASI BUKAN LAGI SEKADAR TREN, MELAINKAN KEBUTUHAN MENDESAK BAGI UMKM UNTUK TETAP RELEVAN DAN BERSAING DI PASAR GLOBAL YANG SEMAKIN KOMPETITIF.

Sobat Rupiah termasuk pelaku UMKM? Sudah menerapkan digitalisasi? Jika belum, Sobat perlu mencobanya. Jangan bayangkan bahwa Sobat harus mengadopsi teknologi yang rumit dan mahal, digitalisasi dapat dimulai dengan langkah-langkah sederhana, memanfaatkan berbagai platform yang sangat terjangkau, bahkan gratis.

Mengapa Sobat perlu melakukan digitalisasi? Sebab, manfaatnya begitu banyak. Langkah mudah

seperti menggunakan QRIS misalnya, bermanfaat untuk pencatatan keuangan yang lebih akuntabel. Hal ini akan membantu Sobat dalam mengakses modal pengembangan usaha baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Manfaat digitalisasi lainnya, usaha Sobat dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Bukan hanya di lingkup lokal, melainkan juga bisa menembus pasar global. Nah, Sobat tertarik tapi ragu memulainya? Coba ikuti langkah-langkah berikut, ya!

Manfaatkan Kanal Pemasaran Digital

Di era digital saat ini, eksis secara *online* sangat penting. Hal tersebut membuka peluang baru untuk meningkatkan penjualan secara global tanpa batasan geografis. Dalam hal ini, Sobat perlu mengoptimalkan berbagai kanal digital, termasuk media sosial, untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, membagikan konten yang bermanfaat, dan memperluas jaringan pengikut.

Langkah lain, bangun *website* yang responsif dan menarik. Memiliki *website* yang mudah dinavigasi, informatif, dan estetik dapat meningkatkan citra profesional dan kepercayaan pelanggan. Lalu, Sobat

jangan ragu untuk menjual produk di *e-commerce*. Langkah ini memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Jangan lupa, gunakan kanal pembayaran digital.

Terobosan ini perlu diiringi dengan upaya memahami preferensi konsumen dan kondisi pasar global, serta melakukan perencanaan produksi dan manajemen rantai pasokan untuk memenuhi permintaan pasar dengan berkelanjutan.



Bangun Merek yang Kuat

Membangun merek yang kuat amat penting untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Penguatan merek mencakup penciptaan identitas secara konsisten, fokus memberikan pengalaman yang baik pada pelanggan, mengoptimalkan kehadiran digital, serta mengedepankan nilai dan cerita merek.

Untuk menciptakan identitas merek, unsur logo, warna,



gaya bahasa, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi harus bersinergi guna menciptakan kesan yang konsisten dan mudah dikenali. Lalu, untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan, berikan pelayanan yang ramah, jaga kualitas produk/layanan secara konsisten, dan hargai umpan balik yang diberikan.

Sobat juga perlu mengedepankan nilai dan cerita merek. Gunakan cerita tentang asal-usul merek, inspirasi di balik produk, atau perjalanan bisnis Sobat untuk menarik minat dan membangun koneksi emosional dengan pelanggan. Jika merek Sobat memiliki nilai-nilai tertentu seperti keberlanjutan, etika kerja, atau kontribusi sosial, pastikan untuk mempromosikannya dengan jelas.

Manfaatkan Program Pengembangan UMKM

Perlu Sobat pahami, UMKM merupakan salah satu sektor penopang ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah dan berbagai pihak terkait, termasuk Bank Indonesia (BI), gencar menjalankan program-program pengembangan UMKM. Sobat dapat memanfaatkan program-program tersebut.

BI misalnya, mendorong UMKM *Go Digital* melalui program *onboarding* UMKM, *digital farming*, dan pencatatan keuangan digital (SIAPIK). BI juga mendorong UMKM untuk *go export* melalui sejumlah upaya. Pertama, penguatan kurasi yang sejalan dengan permintaan dan persyaratan pasar global yang didasarkan pada *market intelligence*. Kedua, akses promosi ke pasar global melalui berbagai kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional, termasuk penyelenggaraan Karya

Kreatif Indonesia, perluasan *trading house* seperti Indonesia House of Beans di Tokyo, Malaysia, Singapura, serta pembentukan Indonesia SME (*Small Medium Enterprises*) Hub yang memiliki sejumlah fitur unggulan, seperti penyediaan informasi ekspor dan *market intelligence* serta memungkinkan UMKM untuk dapat berkomunikasi langsung dengan pembeli dari pasar luar negeri dengan memanfaatkan fitur *virtual business lounge*. Ketiga, literasi digital yang merupakan kunci bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko *fraud*. Keempat, edukasi untuk mendorong UMKM menuju pasar ekspor, diantaranya melalui sejumlah modul *UMKM Go Export* yang berisi potensi usaha, tren pasar, strategi, peluang, prosedur, persyaratan, serta tips dan trik lainnya. Menarik, bukan?

Ikuti Tren Global

Untuk menangkap potensi pasar global, Sobat perlu mengikuti tren global terkini, misalnya peningkatan minat masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan atau *sustainable goods*. Perlu diketahui, permintaan global akan *sustainable goods* mengalami kenaikan signifikan sebesar 71% dalam kurun lima tahun sejak 2016-2020. Fenomena itu dikenal dengan istilah *eco-wakening*.

Hasil asesmen BI di 2023, terdapat 30% UMKM yang terklasifikasi ke dalam UMKM Hijau. Ke depan, BI akan terus mengupayakan transformasi UMKM menuju keberlanjutan lingkungan dan mengadopsi digitalisasi dalam produksi, pemasaran, maupun aspek sosial ekonominya.

Sobat Rupiah, itulah langkah-langkah menjangkau pasar global melalui digitalisasi. Memang, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk UMKM yang ingin bertahan dan tumbuh. Dengan mengadopsi teknologi digital secara efektif dan strategis, Sobat dapat menjaga kelangsungan serta pertumbuhan bisnis di masa depan.





Pempek Nabil

CITA RASA PALEMBANG RAIH SUKSES DARI MEDAN

DENGAN STRATEGI PROMOSI DAN PEMASARAN YANG TEPAT, PEMPEK NABIL YANG MENAWARKAN SAJIAN KHAS PALEMBANG BERHASIL MEMIKAT BANYAK PELANGGAN DI MEDAN, JUGA SEJUMLAH KOTA LAIN.

Pempek merupakan salah satu hidangan yang jadi favorit banyak orang. Makanan asal Palembang ini dibuat dari daging ikan tenggiri yang dicampur tepung sagu dan bumbu-bumbu, lalu direbus dan digoreng. Rasanya dominan gurih, teksturnya sedikit kering di luar, namun kenyal dan lembut di bagian dalam. Jodohnya adalah cuco, si saus hitam yang diracik dari air, gula merah, cabai rawit, bawang putih, dan asam jawa. Pedasnya menggigit, asamnya

menyegarkan, dan manisnya tak terlalu berlebihan. Ketiga rasa ini berpadu harmoni dengan gurihnya tenggiri.

Popularitas pempek menjadi inspirasi bagi Widyawati, perempuan asal Palembang yang merantau di Medan, Sumatra Utara (Sumut), untuk merintis usaha produksi dan penjualan jajanan itu. Pempek Nabil, begitu merek yang disematkannya.

Meski cukup jauh dari tanah aslinya di Palembang, pempek diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, bahkan pemasarannya meluas hingga ke luar kota. Hal ini tak terlepas dari keaslian rasanya. Widyawati tetap setia pada resep tradisional pempek Palembang.

“Ketika saya pulang kampung, pasti saya sempatkan untuk belajar



Widyawati
Pendiri Pempek Nabil

FOTO-FOTO DOK. PEMPEK NABIL



buat pempek dengan rasa autentik,” ungkap Widyawati, mengenang awal-awal pembentukan usahanya ini.

Meski kelahiran Palembang dan akrab dengan pempek sejak kecil, Widyawati mengaku bukanlah koki ulung yang mahir membuat pempek. Saat itu, tepatnya tahun 2015 Widyawati ingin tetap produktif setelah berhenti dari pekerjaannya. Alih-alih sekadar ikut suami yang dipindahtugaskan ke Medan, Widyawati bertekad untuk memulai usaha jualan pempek.

Bisa dibilang, lulusan Sarjana Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya ini memulai dari nol. Semangat tinggi menjadi bekal utamanya. Selain rajin mempelajari resep dan teknik pembuatan pempek, dia mengikuti berbagai kursus untuk memperkuat mereknya dan mempelajari teknik-teknik pemasaran. Ia juga tekun mendengarkan saran dan masukan dari para pelanggannya.

Menaklukan Pasar Medan

Menghadirkan pempek Palembang ke Medan bukanlah tanpa tantangan. Pada awalnya, banyak masyarakat setempat yang belum familiar dengan kuliner

khas Tanah Sriwijaya ini. Widyawati menyadari, untuk dapat bersaing di pasar yang padat, ia perlu melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menjual makanan.

Maka, ia pun memanfaatkan kekuatan media sosial dengan membuat konten yang menarik, membagikan resep, serta menampilkan proses pembuatan pempek yang autentik. Melalui video dan foto yang menggugah selera, ia membawa masyarakat Medan untuk memahami proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan.

Orang-orang yang awalnya asing dengan pempek, perlahan-lahan terpesona oleh cita rasa yang autentik dan kualitas yang dihadirkan. Widyawati memastikan setiap pempek yang disajikan tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan keaslian kuliner Palembang. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan pelanggan, tetapi juga membangun loyalitas mereka terhadap Pempek Nabil.

Alhasil, pempek yang awalnya hanya berbasis *pre-order* secara daring ini semakin dikenal luas. Tahun 2017 menjadi titik baliknya. Tahun itu, Widyawati yang awalnya bekerja sendirian mulai merekrut

PEMPEK NABIL

Pendiri: Widyawati

- Kompleks Tasbih I Blok D No.62 Medan Sunggal, Medan, Sumatra Utara
- Perumahan Menteng Indah, Ruko Blok B1 No.30 Medan Denai, Medan, Sumatra Utara

@pempeknabilofficial

- Jenis Produk
 - Pempek Palembang
 - Aneka *frozen food*
 - Dimsum
 - Kerupuk

karyawan. Ia juga mulai membuka kesempatan bagi mitra *reseller* dan agen. Permintaan yang semula hanya terbatas pada wilayah lokal mulai meluas hingga datang dari berbagai daerah di Sumatra mulai dari Medan, Aceh, Pasaman, Pekanbaru, bahkan Batam.

“(Momen) Itu seperti jadi loncatan terbesar Pempek Nabil. Yang tadinya hanya PO (*pre-order*), sejak saat itu banyak yang berminat, jadi kami kirim ke banyak wilayah,” ucapnya.

Sampai saat ini sudah ada lebih dari 100 *reseller* yang tersebar di beberapa kota. Pempek Nabil pun telah bekerja sama dengan sekitar 30 tempat terdiri dari restoran, kafe, hotel, dan agen untuk memasok pempek. Tak mengherankan, dalam sekali produksi dibutuhkan sekitar 30–50 kg ikan tenggiri yang menghasilkan 500 sampai 700 buah pempek aneka varian.

Umur simpan Pempek Nabil beku yang relatif singkat, yakni hanya tiga hari, membuat pengiriman terjauh baru sampai ke Jakarta. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi dirinya untuk menyediakan permintaan bagi mitra yang lebih jauh.

Buka Gerai

Bisnis Pempek Nabil diakui Widyawati semakin moncer sejak dia memutuskan bergabung sebagai anggota Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut pada 2018. “Dukungan dari BI sangat membantu kami dalam banyak hal,” ujar Widyawati penuh syukur.

Salah satu keuntungan terbesar yang dirasakannya ialah pelatihan peningkatan kualitas produk dan pemasaran, penyertaan di berbagai pameran, hingga kemudahan dalam proses pengajuan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya, pembinaan dari BI tidak hanya memperluas pasar, tapi juga semakin meningkatkan citra Pempek Nabil sebagai kuliner Palembang yang premium di Medan.

Pengembangan usaha lainnya, setelah 18 tahun berdiri, Pempek Nabil pun membuka gerai pertamanya di Kompleks Tasbih, Medan. Peluncuran gerai yang dilakukan pada 19 Mei 2023 itu dihadiri ratusan pelanggan. Mereka yang selama ini hanya bisa membeli secara daring jadi punya pilihan membeli langsung. Gerai ini melengkapi destinasi kuliner di Medan yang multikultural. Saat ini, Pempek Nabil telah membuka dua gerai di Medan dan akan menambah gerai lagi di waktu mendatang.

Sobat Rupiah, kisah Pempek Nabil menunjukkan kuliner autentik Nusantara memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ladang usaha. Tentu saja, langkah pengembangannya harus disertai komitmen kuat dan strategi tepat, seperti yang dicontohkan Widyawati.

Sobat Rupiah ingin mencicipi Pempek Nabil? Ayo, kunjungi gerainya di *event Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024* akhir Oktober mendatang di Jakarta!



Sumut, BERJAYA SEJAK ERA KOLONIAL

FOTO-FOTO DOK. BI



**SUMATRA UTARA
MEMILIKI BANYAK
POTENSI EKONOMI,
MULAI DARI POSISINYA
YANG STRATEGIS
UNTUK PERDAGANGAN
INTERNASIONAL,
WILAYAH YANG LUAS,
KEKAYAAN SUMBER
DAYA ALAM, HINGGA
KEINDAHAN ALAMNYA.
BANK INDONESIA TURUT
AKTIF DALAM UPAYA
OPTIMALISASI POTENSI
TERSEBUT.**

Terletak di bagian utara Pulau Sumatra, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, Sumut merupakan bagian dari pemerintahan yang bernama Gouvernemen van Sumatra, dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatra. Gouvernemen van Sumatra dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kota Medan.

Peran penting wilayah ini di masa lampau dapat dilihat dari banyaknya bangunan peninggalan era kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri tegak. Salah satu bangunan tersebut adalah gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumut. Letaknya di Jalan Balai Kota, Medan Barat, Kota Medan, gedung ini diapit oleh dua bangunan bersejarah lainnya, yaitu Medan Town Hall (Balai Kota) dan De Boer Hotel (Grand Inna).

Gedung KPw BI Provinsi Sumut dulunya merupakan kantor De Javasche Bank (DJB) Agentschap Medan yang dibangun pada 1906 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Bangunan tersebut dirancang oleh arsitektur kenamaan Belanda, yakni Hulswit, Fermont, dan Cuypers. Bangunan ini hadir dengan model Art Deco dengan pilar-pilar besar dan berkubah, yang menjadi ciri khas bangunan Eropa kala itu. Meskipun bangunan mengalami renovasi beberapa kali, bentuk aslinya tetap dipertahankan seperti yang terlihat saat ini.

DJB Agentschap Medan

DJB Agentschap Medan merupakan cabang dari DJB, bank sentral

pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia (Jakarta).

Kala itu, wilayah yang kini disebut Sumut merupakan bagian dari Keresidenan Sumatra Timur. Wilayah ini, terutama Medan, merupakan daerah perkebunan yang sangat menguntungkan, dengan tanaman utamanya ialah tembakau. Tembakau tersebut banyak dipakai untuk pembuatan cerutu berkualitas.

Banyak pengusaha swasta dari negara-negara kolonial Eropa yang menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Perdagangan ekspor impor pun menjadi bagian dari kegiatan ekonomi di Medan yang juga dikenal sebagai Paris van Sumatra. Alhasil, di wilayah ini beredar sejumlah mata uang dolar. Terdapat beberapa bank swasta yang melayani kegiatan keuangan di wilayah itu.

Namun, Belanda risau karena mata uang mereka, gulden, kalah pamor. Nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai sejumlah mata uang dolar yang digunakan di wilayah tersebut. Padahal, Karesidenan Sumatra Timur merupakan wilayah yang termasuk dalam kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan politik guldenisasi, yaitu kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan gulden sebagai satu-satunya mata uang di wilayah kekuasaan mereka, pada 1906 mereka memutuskan untuk mendirikan DJB Agentschap Medan sebagai bank sirkulasi guna memaksimalkan penggunaan uang gulden di Sumatra Timur.

DJB Agentschap Medan resmi beroperasi sejak 30 Juli 1907. Dalam



perkembangannya, bank ini memainkan peran penting dalam kegiatan perekonomian dan keuangan di Sumatra Timur, khususnya Medan. Bahkan, bank tersebut membuka cabang di Tanjung Balai pada 15 Januari 1908 dan Tanjung Pura pada 3 Februari 1908. Akan tetapi, keberadaan kedua cabang ini tak bertahan lama, keduanya tutup setelah terjadi resesi pada 1930-an.

Pascakemerdekaan Indonesia, pada 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia (RI). Oleh karena itu, Pemerintah RI memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh Pemerintah RI, dengan besaran mencapai 97%. Setelah melalui serangkaian proses, pada 1 Juli 1953 Bank Indonesia (BI) resmi berdiri sebagai bank sentral RI.

Nasionalisasi DJB juga dilakukan pada cabang-cabangnya. DJB Agentschap Medan berubah menjadi Kantor BI Cabang Medan. Kemudian, seiring dengan pelaksanaan reorganisasi BI, Kantor BI Cabang Medan berubah lagi

menjadi Kantor BI Medan, lalu berganti menjadi KPw BI Wilayah IX, dan terakhir menjadi KPw BI Provinsi Sumut.

Potensi Ekonomi Sumut

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPw BI Provinsi Sumut senantiasa mendukung upaya pengembangan perekonomian setempat.

Ekonomi Sumut secara historis telah berkembang lebih cepat daripada ekonomi nasional, menjadikannya salah satu penyokong ekonomi Indonesia. Potensi ekonomi Sumut didukung oleh letak geografis yang strategis untuk perdagangan internasional, wilayah yang luas, kekayaan sumber daya alam, keindahan alam, serta jumlah penduduk dengan usia produktif yang besar.

Dengan keunggulan geografisnya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Sumut mampu menjadi pusat perdagangan dan konektivitas di wilayah Barat Indonesia. Potensi sumber daya alamnya menjadi penopang industri-industri manufaktur berbasis perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Komoditas utama Sumut yang menjadi primadona ekspor cukup beragam, di antaranya adalah sawit, karet, kopi, kelapa, biji pinang, *pulp*, dan batu bara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor Sumut mengalami peningkatan pada periode Agustus 2024 dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 969,75 juta dolar AS menjadi 1.041,48 juta dolar AS. Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar Sumut yaitu 191,95 juta dolar AS, diikuti Amerika Serikat 124,34 juta dolar AS, dan India 72,29 juta dolar AS.

Selain itu, keindahan alam Sumut, terutama Danau Toba, yang merupakan destinasi wisata utama nasional, berkontribusi besar pada sektor pariwisata. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumut pada bulan Agustus 2024 mencapai 22.261 kunjungan, sementara pada bulan

Juli 2024 tercatat 22.198 kunjungan.

Untuk mendukung pengembangan potensi-potensi tersebut, pembangunan infrastruktur terus dilakukan, terutama untuk meningkatkan konektivitas. Terdapat beberapa proyek investasi strategis yang diusung Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mendorong perekonomian, seperti pembangunan jalan tol yang saat ini telah terhubung sampai dengan kota pematang siantar, rencana pembangunan *Light Rail Transit* (LRT), dan revitalisasi pelabuhan. KPw BI Provinsi Sumut pun menjadi bagian dari kerja kolaboratif bersama berbagai pihak terkait untuk mengembangkan ekonomi Sumut.

Pengendalian Inflasi

Inflasi terkendali menjadi salah satu syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. KPw BI Provinsi Sumut turut serta dalam upaya-upaya pengendalian inflasi bersama Pemda dan sejumlah pihak terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satu programnya ialah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif (4K). Hasilnya, angka inflasi Sumut pada Agustus 2024 sebesar 2,06%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 2,13%.

KPw BI Provinsi Sumut juga turut aktif dalam program-program pengembangan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah itu antara lain dilakukan melalui program pendampingan, pelatihan, serta penyertaan UMKM-UMKM dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan promosi dan pemasaran. Ke depan, KPw BI Provinsi Sumut akan terus meningkatkan perannya untuk meningkatkan perekonomian Sumut secara kolaboratif bersama berbagai pihak terkait.



SUMATRA UTARA PUNYA DESTINASI SUPER PRIORITAS YANG DIPROYEKSIKAN SEBAGAI BALI BARU, YAITU DANAU TOBA. PARIWISATA UNGGULAN INI PUNYA PAKET LENGKAP: ALAM YANG MEMIKAT, ATRAKSI BUDAYA SARAT TRADISI, HINGGA WISATA SEJARAH YANG KAYA CERITA.

FOTO-FOTO DOK. MI

Sobat Rupiah, penjelajahan ke Danau Toba bisa diawali dari Pulau Samosir, daratan yang terletak di tengah danau vulkanik itu. Museum Huta Bolon, di Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, jadi destinasi wajib. Di museum ini, Sobat bisa melihat kehidupan suku Batak dari dekat berdasarkan benda-benda peninggalan leluhur.

Jejak Leluhur di Museum Huta Bolon

Memasuki areal museum ini, pandangan mata kita akan langsung berjumpa lima bangunan yang berjejer rapi. Ukurannya tidak terlalu besar, lebarnya 2 meter dengan panjang 4 meter. Ini adalah kuburan nenek moyang. Keberadaan bangunan ini menjadi penanda, suku Batak sangat menghargai

Di Danau Toba

SEMUA ADA



dan menjunjung tinggi leluhurnya.

Di belakang bangunan, terdapat rumah adat Batak yang besar beratap ijuk yang merupakan bangunan museum. Di dalamnya tersimpan koleksi peninggalan leluhur suku Batak Toba. Saat memasuki museum, pengunjung harus melewati tangga melalui pintu berukuran 1 x 1,5 meter yang terletak di tengah.

Setelah masuk, suasana terasa lebih lapang. Terlihat berbagai macam peninggalan, antara lain Tunggal Panaluan, yaitu sejenis tongkat yang

biasa dibawa raja adat dan dianggap memiliki kekuatan magis. Tongkat ini mempunyai ukiran tengkorak manusia dari atas ke bawah.

Di sini juga terlihat berbagai macam ulos, kain tenun khas Batak. Koleksi lainnya ialah pinggan, piring yang digunakan raja, *sitang* atau tempat minum tuak, dan *tulpang*, alat pengisap candu. Ada pula gambar silsilah asal muasal suku Batak. Selain bangunan utama, ada rumah adat kedua yang jauh lebih sederhana. Bentuknya seperti

pendopo, tidak memiliki dinding. Di dalamnya terdapat *solu bolon*, perahu besar yang biasa dinaiki raja-raja Batak.

Tak jauh dari museum, ada perkampungan tradisional yang disebut Huta, yang dikelilingi dinding batu setinggi 2 meter. Dinding batu dahulu berfungsi sebagai benteng untuk menghalangi musuh masuk ke kampung. Hanya ada satu pintu gerbang sebagai akses keluar masuk. Di dalam perkampungan, berjejer dua rumah adat besar yang berada di ujung kiri, salah satunya dinamai rumah *bolon*.

Di ujung kanan perkampungan, terdapat lima bangunan yang disebut *sopo*. Fungsinya sebagai lumbung padi. Di halaman luas antara rumah *bolon* dan *sopo* itulah yang sekarang menjadi tempat menampilkan tarian tradisional Tortor, lengkap dengan instrumen musik khas Batak berupa kecapi, serunai (alat musik tiup tradisional), ditambah *tagading* (gendang Batak).

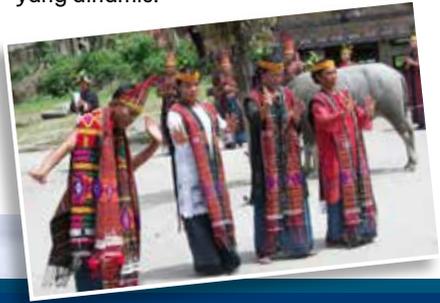
Sejarahnya, halaman tersebut merupakan tempat upacara adat potong kerbau. Kerbau dijadikan persembahan penolak bala, kepalanya ditempatkan di atas atap rumah. Saat ini, pertunjukan upacara dilakukan tanpa benar-benar memotong kerbau, tetapi sekadar seremoni namun tetap menyertakan kerbau. Acara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Terpesona Tortor

Selain menjelajahi bangunan-bangunan sarat sejarah dan tradisi, Desa Simanindo juga istimewa, karena di sini atraksi tarian *Tortor* dan *Sigale-gale* ditampilkan setiap harinya. Para penari menjadikan kegiatan rutin itu sebagai latihan sekaligus upaya memelihara tradisi.

Ada pertunjukkan *Gondang Lae-Lae*, yaitu tarian Tortor untuk memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar kerbau yang akan dipersembahkan tidak bertingkah jelek sewaktu digiring. Ada kepercayaan orang Batak zaman dulu bahwa setiap tingkah laku dari kerbau merupakan pertanda sesuatu yang baik ataupun buruk.

Kemudian *Gondang Mula-Mula*, yaitu Tortor doa kepada pencipta langit dan bumi supaya menganugerahkan keturunan, membawa kekayaan, dan menjauhkan bala, serta menyembuhkan berbagai penyakit. Pada rangkaian pertunjukkan ini, para pelancong dapat ikut menari bersama tabuhan *gondang* yang dinamis.



- Akses menuju Museum Huta Bolon dapat ditempuh dari Dermaga Ajibata, Kota Parapat, Simalungun, Sobat tinggal menyeberangi Danau Toba menggunakan feri atau kapal menuju Dermaga Simanindo. Dari Dermaga Simanindo, museum tersebut hanya berjarak 100 meter ke arah Pangurusan, ibu kota Samosir.
- Jalur lain ke lokasi ini bisa ditempuh melalui Tomok, kawasan wisata yang menjajakan beragam suvenir yang pembelianya bisa memakai QRIS.



Jelajah Kaldera Toba

Jelajah Danau Toba patut dilengkapi dengan wisata olahraga di Geopark Kaldera Toba untuk melihat langsung jejak letusan gunung 800 ribu tahun lalu. Fenomena alam itu meninggalkan panorama nan memesona, kita bisa menikmatinya dari puncak Gunung Pusuk Buhit. Berada di ketinggian 1.800-an meter dari permukaan laut, Pusuk Buhit menyuguhkan udara sejuk.

Kaldera Toba ini terbentuk setelah tiga letusan dahsyat gunung api raksasa yaitu Gunung Toba. Menurut para geolog, letusan pertama, sekitar 800 ribu tahun lalu, membentuk kaldera di selatan Danau Toba yang meliputi Parapat dan Porsea. Letusan kedua, 500 ribu tahun lalu, membentuk kaldera di utara Danau Toba yang mencakup wilayah Silalahi dan Haranggaol. Letusan ketiga, 74 ribu tahun lalu, membentuk Kaldera Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengahnya.

Panorama Danau Toba dari Segala Sisi

Perjalanan dimulai dari Pos Geopark Kaldera Toba yang terletak di Desa Limbong, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir. Pusuk Buhit tempat yang pas untuk memandangi keindahan Danau Toba yang panjangnya 100 km dan lebar 30 km, yang dikelilingi batu apung peninggalan dari letusan gunung api *supervolcano*.

Di sepanjang pendakian ke Pusuk Buhit terdapat sejumlah batuan besar yang menjadi jejak letusan Gunung Toba yang kemudian menjadi elemen sakral bagi masyarakat Toba. Sampai di puncak Pusuk Buhit, kita dapat melihat Danau Toba dari berbagai sisi, termasuk Pulau Samosir, Danau Toba di kawasan Silalahi, Danau Toba di kawasan Parapat, dan hamparan perkampungan Sianjur Mulamula. Pendakian untuk mencapai Pusuk Buhit sekitar 3-4 jam, waktu tempuh bisa lebih lama lagi jika diselingi momen-momen swafoto. Yuk, ke sini!



Kuliner Legendaris Medan

HARMONI RASA DAN CERITA



FOTO-FOTO DOK. MI; DOK. LONTONG KAK LIN MEDAN

KOTA MEDAN, SUMATRA UTARA MEMPERTEMUKAN KULTUR MELAYU, BATAK, JAWA, INDIA, DAN TIONGHOA DALAM CITA RASA YANG TERSAJI DI BERBAGAI DESTINASI KULINER LEGENDARIS. SOBAT RUPIAH, YUK JELAJAHI, PEMBAYARANNYA BISA PAKAI QRIS, LHO!

Lontong Kak Lin, Destinasi Sarapan Paling Juara

Kedai Lontong Kak Lin menyajikan rempah kuat yang dibawa para pendatang dari India, tradisi mengolah lontong dan pecel yang jadi kultur warga Melayu dan Jawa, hingga mi yang dibawa para keturunan Tionghoa. Primadona di sini, menu lontong berkuah kental wangi rempah, tauco udang, telur rebus, bihun, keripik kentang yang dibalado, serta kerupuk merah yang lazim ditemui dalam ketupat sayur Padang. Rasanya pedas berempah, dengan sensasi unik yang dihadirkan tauco.

Tak boleh dilewatkan pula lontong pecel yang juga menghadirkan potongan lontong lembut yang ditambahkan aneka sayuran rebus, mulai dari tauge hingga kacang panjang yang disiram kuah kacang bercitarasa pecel ala Jawa. Kawannya, sate kerang yang bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas.

Warga Medan terbiasa mengawali paginya di sini. Begitu pula para pelancong yang sengaja melewatkan sarapan di hotel, mereka mampir ke kedai yang telah berusia lima dekade ini. Agar sensasi kenyangannya tak *nanggung*, pesan pula lupis ketan bertabur kelapa parut yang disiram cairan gula aren, menghasilkan paduan gurih dan manis. Pagi di Medan, kurang berenergi jika tak sarapan di Lontong Kak Lin!



📍 Jalan Teuku Cik Ditiro No.8FGH, Madras Hulu, Kota Medan

📱 @lontong_kaklinmedan



📍 Jalan Sei Deli, No.2D, Silalas, Kota Medan

📱 @sotosinarpagiofficial

Soto Sinar Pagi, Kuah Kentalnya Konsisten Sedap

Walaupun kedai Soto Sinar Pagi buka hingga pukul tiga sore, kedai ini juga selalu jadi rekomendasi warga lokal buat bersantap di pagi hari. Kedai yang telah berdiri lebih dari enam dekade ini juga banyak diburu mereka yang tengah pelesiran ke Medan. Jagoan di sini, memangkuh kuah soto kuning bersantan pekat dengan isian daging ayam, sapi, serta paru sapi.

Soto dengan berbagai gaya, mulai dari yang berkuah bening, santan, hingga susu memang menjadi khazanah kekayaan kuliner Nusantara. Di Medan, selain soto Sinar Pagi yang menggunakan daging ayam dan sapi, ada juga yang mengandalkan udang.

Yang menjadi pembeda di Soto Sinar Pagi ialah perkedel kentang yang jadi pelengkap. Di sini tersedia juga menu sop serta pecel.



Cita Rasa Autentik di Kedai Mie Aceh Titi Bobrok

Bertetangga dengan Aceh, tradisi kuliner Negeri Serambi Mekkah itu pun jadi favorit di sini. Kedai Mie Aceh Titi Bobrok menjadi salah satu destinasi yang paling direkomendasikan buat mereka yang ingin menjajal kuatnya rempah Aceh dalam sajian mi, nasi goreng, martabak, hingga kwetiau. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah Mie Aceh Kepiting serta Mie Aceh Daging Sapi.

Kedai yang didirikan Ibu Titi Bobrok ini telah berusia enam dekade. Sajian mi Aceh-nya berupa mi kuning tebal yang ketika diolah dengan digoreng, berkuah, maupun ditumis, teksturnya sama sedapnya. Jangan lupa tambahkan acar bawang yang asam dengan aroma bawang yang khas.

Untuk menghadirkan rasa menenangkan, usai bersantap sajian serba panas, pedas, dan beraroma kuat, pesanlah minuman es timun serut. Minuman berisi potongan kecil timun dalam air dingin yang dikucuri perasan jeruk nipis ini memang juara!

📍 Jalan Setia Budi No.17D, Medan Sunggal, Kota Medan

📱 @mieeacehtitibobrok



Sate Memeng, Eksis Delapan Dekade

Satu lagi penanda bahwa Medan menyerap aneka kultur, yaitu kedai Sate Memeng yang menyajikan menu satai berbahan daging, jeroan sapi dan kambing, serta ayam. Istimewanya, di sini tersedia aneka rupa kuah pelengkap, ada yang bergaya satai Padang yang berkuah kental dan beraroma kuat, ada pula kuah kacang atau sambal kecap yang bergaya satai Madura.

Tersedia lontong sebagai pelengkap di kedai yang dirintis Haji Saimin berbarengan dengan Indonesia Merdeka, pada 1945. Ciri utama Sate Memeng adalah potongan dagingnya yang besar, satu porsi berisi lima tusuk satai.

Patut dipesan juga di sini, mi rebus yang berisi mi kuning, tauge, dan telur rebus yang disiram kuah beraroma rempah dengan kondimennya, kerupuk sagu. Sobat Rupiah wajib mampir ke sini buat bersantap sambil menikmati aroma satai dan menyeruput kuah mi rebus!



Jalan Irian Barat No.2, Gang Buntu, Kota Medan



@satememeng.id

Lestarikan Wastra Leluhur **BERDAYAKAN MASYARAKAT**

BICARA || EDISI 105 TAHUN 2024



FOTO-FOTO DOK. IR & IR SONGKET MELAYU DELI

TIDAK INGIN WARISAN LELUHURNYA HILANG DITELAN MASA, KETURUNAN KESULTANAN DELI TERGERAK UNTUK MENGHIDUPKAN DAN MEMBUDAYAKAN KEMBALI SONGKET MELAYU. USAHA INI, DI SAMPING MELESTARIKAN BUDAYA DAN TRADISI, MAMPU MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN KAUM PEREMPUAN.

Songket adalah jenis kain tenun tradisional rumpun Melayu yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket

Melayu dikenal dengan keindahan motif dan kehalusan kainnya. Pada era kerajaan di Nusantara, songket dipakai oleh raja, sultan, dan kaum bangsawan. Wastra ini bahkan menjadi alat tukar perdagangan yang melambangkan kemakmuran dan kejayaan suatu negeri.

Namun, salah satu warisan budaya ini terancam punah. Penyebabnya beragam, mulai dari semakin langkanya penun, hingga pemasaran songket yang tak mudah, karena kalah saing dengan kain pabrikan yang juga cantik dan lebih murah.

Berangkat dari kondisi tersebut, keturunan Kesultanan Melayu Deli, Tengku Syarfina, mendirikan Yayasan Khazanah Warisan Melayu Deli pada April 2014, untuk menjaga warisan nenek moyangnya agar tak hilang dimakan zaman. Tak berhenti di situ, pada 2016, bersama sang putri, Wan Irfania Ramadhani Lubis yang akrab disapa Fani, ia merintis usaha produksi dan penjualan songket Melayu dengan merek IR & IR Songket Deli.

Dengan ide, kreativitas, dan keterampilannya, Fani yang lulusan Animasi Binus University, membuat IR & IR Songket Deli memiliki kekuatan



tersendiri, terutama desain yang menggabungkan khazanah tradisional dan modern. Tak hanya indah, desain tersebut sarat nilai budaya dan filosofi Melayu.

Bagaimana kisah perjalanan IR & IR Songket Deli? Berikut bincang-bincang *BICARA* dengan Wan Irfania Ramadhani Lubis.

Bagaimana awal mula lahirnya IR & IR Songket Deli?

Awalnya di 2014, ibu saya (Tengku Syarfina) memiliki ide ingin merevitalisasi budaya Melayu Deli. Beliau mendapatkan inspirasi untuk mengangkat produk songket Melayu. Karena, zaman dulu keluarga Kesultanan Deli memakai baju songket tapi sekarang enggak ada songket yang khusus menampilkan kekhasan Melayu Deli, terutama cerita-cerita dan motif-motifnya. Akhirnya, beliau mendirikan yayasan dan mencari orang yang paham tenun di Medan. Bermula dari situ, kami kemudian membuat badan usahanya.

Waktu itu, bagaimana mendapatkan penenun yang

mampu mengaplikasikan tujuan dan ide ibunya?

Kami mendapatkan informasi dari relasi dan saudara yang tinggal di Rantau Prapat. Kebetulan di Rantau Prapat ada orang Batubara yang bisa bikin songket. Nah, dialah yang didatangkan ke Medan untuk mengajar beberapa penenun awal kami.

Saat ini, terdapat 14 orang penenun yang kami berdayakan, sementara total semua pegawai dari penjahit hingga urusan *office* ada 25 orang. Rata-rata pendapatan tergantung pada berapa banyak tenun yang dihasilkan, ada yang lepasan juga, sebagian besar di atas Rp1,5 juta per bulan.

Bagaimana memperoleh bahan baku dan ada berapa jenis motif yang dihasilkan?

Sekitar 70% bahan baku dari lokal, ada juga yang kita ambil dari Jawa. Motif yang dikembangkan IR & IR banyak dan beragam, mengangkat khazanah lokal dan budaya Melayu, di antaranya adalah motif daun ulam raja, bunga kenanga, Istana Maimun, anggrek bulan, bunga kopi, hingga tampuk gelugor.

📍 **IR & IR SONGKET MELAYU DELI**
Jalan Kutilang Dalam No. 2, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara

☎️ 08116517766

📷 @songketdeli

✉️ galerisongketdeli@gmail.com

🕒 **Produk**
Kain songket, tas, dompet, dan pakaian berbahan songket



Yang khas adalah motif daun tembakau Deli yang dicipta pertama kali oleh ibunda, dengan filosofi menghadirkan kisah gemilang Tanah Deli. Motif ini sudah mendapatkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari Kementerian Hukum dan HAM yang dalam prosesnya kami dibantu oleh Bank Indonesia (BI).

Apa saja keunggulan songket IR & IR?

Keunggulan kami ada pada tradisi, serta inovasi motif dan perpaduan warna. Ketika kami membuat motif kontemporer, tetap tidak akan lepas dari *history* dan budaya Melayu Deli.

Bagaimana cara pemasarannya?

Kami memiliki *workshop* sekaligus tempat *showcase* yang bisa didatangi pengunjung. Orang-orang bisa datang melihat koleksi kami sekaligus proses produksinya. Sebagian besar pemasaran dilakukan secara daring di Instagram dan WhatsApp, serta mengikuti pameran di dalam negeri dan internasional. Kami pernah mengikuti pameran di ajang Rising50 (Singapura), New York Now, dan pameran di Thailand.

Seberapa besar kapasitas produksinya?

Cukup terbatas, sekitar 50 kain per bulan. Penenun yang sudah mahir, bisa menyelesaikan kain berukuran 200 x 100 sentimeter dalam waktu satu minggu untuk menenun saja. Sebelumnya ada proses persiapan di awal, seperti menghani, menyosok, memotif, menggulung, baru masuk ke proses tenun, persiapan ini memakan waktu seminggu. Untuk bahan katun dan sutra, waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi. Bahan dasar yang kami gunakan ada poliester rayon, katun, dan katun sutra. Kami juga punya rekanan, ketika ada kebutuhan mendesak yang cukup banyak, kami meminta bantuan rekanan. Harga songket kami Rp600 ribu ke atas,

omzet per bulan rata-rata sekitar Rp50 juta.

Menjadi UMKM binaan BI, apa saja manfaatnya dan bagaimana awal mulanya bisa terpilih?

Awal mula jadi binaan BI sejak 2015, ketemunya melalui Facebook. Waktu itu Ibu Suti dari BI mencari info tentang perajin yang bergerak di budaya Melayu. Ketemulah dengan kami di Facebook, kemudian beliau datang ke galeri. Kami lalu diundang ke BI (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut) dan ditawarkan menjadi UMKM binaan hingga sekarang.

Banyak manfaat yang kami dapatkan dengan menjadi binaan BI, terutama dari segi peningkatan *skill*, dibimbing mentor-mentor yang kami butuhkan, dan diberikan fasilitas studi banding baik ke UMKM maupun desainer lain sehingga kami punya referensi-referensi baru dan tambahan relasi.

BI juga memfasilitasi kami ikut di pameran-pameran, baik di dalam maupun luar negeri. Kami mendapatkan bimtek (bimbingan teknis) dan pernah mendapatkan bantuan PSBI (Program Sosial Bank Indonesia) berupa ATBM (alat tenun bukan mesin) dan pelatihan selama satu bulan di *workshop* kami.

Apa saja pengembangan yang sedang dilakukan?

Kami sedang mengembangkan pewarna alam dari bahan limbah di sekitar desa, bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara. Langkah ini bentuk *concern* kami ke lingkungan. Kami juga tengah mengembangkan produk turunan songket yang *ready to wear* untuk merespons perkembangan pasar, sebab banyak kaum milenial dan gen Z lebih suka yang 'enggak repot' dan memilih produk simpel. Produk *ready to wear* tersebut kami produksi dengan merek Irfania dan turut tampil di KKI (Karya Kreatif Indonesia) Agustus lalu.

KOORDINASI KEBIJAKAN KUNCI ATASI TANTANGAN GLOBAL

Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dalam mengatasi tantangan global. Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 (*Finance Minister and Central Bank Governors/FMCBGs*) di bawah Presidensi Brasil, pada 25-26 Juli 2024 di Rio de Janeiro, Brasil.

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 sependapat bahwa perekonomian global tumbuh tangguh, namun masih dibayangi ketidakpastian yang berpotensi mengganggu prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional.

Untuk itu, Gubernur Perry menyerukan agar negara maju melakukan langkah-langkah

mengatasi *spillover* tantangan global terhadap negara berkembang. Pertama, memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan respons dan arah kebijakan bagi pelaku di sektor keuangan, menjaga persepsi, dan meredakan reaksi pasar sehingga dapat memperkuat stabilitas global.

Kedua, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan secara lebih hati-hati. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas. BI juga menggarisbawahi pentingnya asesmen risiko yang komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu memitigasi risiko.



FOTO SHUTTERSTOCK



FOTO DOK. BI

PELUNCURAN *CENTRAL COUNTERPARTY* UNTUK MAJUKAN PUVA

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang modern dan maju adalah pasar yang memiliki volume dan likuiditas yang besar, segmen pelaku yang variatif, pasar yang stabil dan efisien, didukung infrastruktur pasar yang saling terinterkoneksi, serta memiliki interoperabilitas dan terintegrasi. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan perbankan membentuk dan mengembangkan *Central Counterparty* (CCP).

Demikian mengemuka dalam peluncuran CCP di PUVA yang mengangkat tema “Implementasi CCP untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia yang Modern dan Maju”, Senin (30/9), di Jakarta. CCP merupakan salah satu infrastruktur pasar keuangan yang bersifat sistemik, yang menjalankan kliring dan melakukan pembaruan utang (novasi) atas transaksi anggotanya.

Peluncuran CCP ini merupakan wujud dari pemenuhan amanat

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan mandat kepada BI untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi PUVA, termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK). Peluncuran ini juga merupakan pemenuhan komitmen G20 Over the Counter (OTC) Derivatives Market Reform serta capaian dari implementasi Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa CCP khusus derivatif Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT) siap diimplementasikan guna mengakselerasi pendalaman PUVA, serta mendukung transmisi kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan perekonomian. Sebagai tahap awal implementasi CCP, terdapat 8 (delapan) bank yang diikutsertakan, yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Permata, Danamon, dan Maybank, serta BEI sebagai pemegang saham existing KPEI.



FOTO DOK. BI

STABILITAS SISTEM KEUANGAN TETAP TERJAGA

Rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III tahun 2024 pada Senin (29/7) menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia triwulan II-2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global, seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Memasuki awal triwulan III 2024, tekanan terpantau mereda, namun berbagai faktor risiko yang berkembang tetap perlu dicermati dan diantisipasi.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5% (yoy), melanjutkan kinerja triwulan I 2024 yang tumbuh sebesar 5,11% (yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2024 tercatat 2,51% (yoy). Nilai tukar Rupiah menguat, dipengaruhi bauran kebijakan moneter. Nilai tukar Rupiah per 26

Juli 2024 menguat 0,52% (mtd) jika dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024.

Ke depan, kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-growth*).

KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kewaspadaan seiring masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dunia, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.

IMF: PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TETAP KUAT

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak eksternal, dengan inflasi yang terjaga pada kisaran target yang ditetapkan dan sektor keuangan yang tangguh. Kerangka kebijakan Indonesia yang berhati-hati, baik di bidang moneter, fiskal, maupun keuangan dinilai IMF telah menciptakan fondasi kokoh untuk stabilitas makro dan kesejahteraan sosial.

Dewan Direktur IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif mengenai langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh oleh otoritas Indonesia. Apresiasi tersebut terutama terkait beberapa poin penting. Pertama, komitmen Indonesia terhadap disiplin fiskal. Kedua, penurunan inflasi sesuai dengan kisaran target yang telah ditetapkan dan kebijakan moneter yang memperhatikan perkembangan data (*data dependent*), upaya

pendalaman pasar dan upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Ketiga, upaya penguatan kerangka kebijakan makroprudensial. Keempat, agenda pertumbuhan menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Kelima, komitmen untuk mencapai target *zero emission* pada 2060 serta langkah-langkah yang diambil untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% dan 5,1% di tahun 2024 dan 2025, di tengah beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti volatilitas harga komoditas, pelambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan dampak rambatan akibat kondisi *high-for-longer* pada keuangan global.



FOTO SHUTTERSTOCK



FOTO SHUTTERSTOCK

NEXUS, GERBANG PENGHUBUNG SISTEM PEMBAYARAN GLOBAL

Bank Indonesia (BI), Bank for International Settlements (BIS), bersama Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand telah menyelesaikan *blueprint* (cetak biru) Tahap 3 Proyek Nexus. Cetak biru ini memungkinkan para negara peserta untuk melakukan interkoneksi pembayaran instan domestik yang dimiliki peserta di kancah global dengan lancar.

Proyek Nexus merupakan inisiatif dari BIS Innovation Hub yang bertujuan meningkatkan pembayaran antarnegara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik (*instant payment systems/IPS*) secara global. Proyek Nexus merupakan proyek pertama BIS Innovation Hub di bidang pembayaran yang menuju implementasi.

BIS berperan sebagai penasihat Proyek Nexus sekaligus akan menyiapkan skema operasional dan membuka peluang bagi

peserta baru dari seluruh dunia. Nexus dirancang untuk menstandarisasi metode konektivitas agar IPS domestik dapat terhubung satu sama lain. Standardisasi Nexus memungkinkan operator suatu negara hanya perlu membuat satu koneksi ke Nexus, tanpa harus membuat koneksi khusus dengan setiap negara yang ingin dihubungkan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, tujuan Nexus ialah mencapai pembayaran antarnegara yang dapat diimplementasikan berdasarkan kerangka kebijakan yang kuat, inklusif, dengan manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya, Proyek Nexus akan melangkah pada pengembangan Tahap 4 dengan fokus pada pembentukan entitas baru, yaitu Nexus Scheme Organization (NSO), yang akan bertanggung jawab mengelola skema Nexus, dan melanjutkan misi untuk mencapai pembayaran antarnegara secara instan.

BI SAMPAIKAN RENCANA ANGGARAN TAHUNAN 2025 KE DPR

Bank Indonesia (BI) menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Bank Indonesia Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada pertengahan Agustus lalu. Penyampaian RATBI dan RPCT dilakukan sebagai pemenuhan amanat Pasal 60 dan Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

RATBI merupakan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran BI dalam periode 1 (satu) tahun untuk melaksanakan Bauran Kebijakan BI yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta melaksanakan

pengelolaan kelembagaan BI. RATBI terdiri dari: (1) Evaluasi Pelaksanaan ATBI Operasional Tahun 2024 dan RATBI Operasional Tahun 2025 guna memperoleh persetujuan, serta (2) Evaluasi Pelaksanaan ATBI Kebijakan Tahun 2024 dan RATBI Kebijakan Tahun 2025 sebagai laporan khusus.

Adapun RPCT Tahun 2025 mencakup biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, serta peningkatan kualitas teknologi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BI serta penyertaan modal, guna memperoleh persetujuan. Penyusunan RATBI dan RPCT Tahun 2025 mengangkat semangat koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi sesuai komitmen BI untuk memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



FOTO SHUTTERSTOCK

Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2024 yang diadakan Agustus 2024 semakin memperteguh persatuan dan nasionalisme. Diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, festival ini juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.

Apa pendapat Sobat Rupiah?

Biasakan menjaga kerapian bentuk fisik mata uang, tidak melipat, merusak, bahkan merobek. Sekarang mencoba ingin pakai dompet panjang anti lipat 👍

📍 @praditive

Semakin cinta, bangga, paham Rupiah. Terima kasih Pak Perry Warjiyo selaku Gubernur BI telah mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah NKRI

📍 @Indonesianstingleesbee

Menyala Rupiah, menyala Bank Indonesia 🇮🇩🇮🇩🇮🇩

📍 @kopiseribukebaikan

Keren!! Senang banget bisa kunjungan ke FERBI 2024

📍 @kisesbeerry

Acaranya bagus, banyak edukasinya

📍 @rei_nichiza

Hari ini nuker uang logam di FERBI. Terima kasih BI, sukses terus

📍 @mitahestirani

Kereeenn.. Rupiah untuk NKRI, cerminan kebhinekaan bangsa, simbol kedaulatan negara.. Merinding euy.. 👍

📍 @dyahutami6331

KUIS

Sobat Rupiah, dalam gelaran FEKDI x KKI 2024, Bank Indonesia meluncurkan peta jalan untuk mendorong kemajuan digitalisasi sistem pembayaran Indonesia 2025-2030. Apakah nama peta jalan tersebut? Yuk, susun huruf acak berikut untuk mendapatkan jawabannya!

PLUINBETR TISMSE BARAYPAMEN

NESODINAI 0032

Seputar Belanja

KRIUK!

Di waktu istirahat, Tania nampak bersemangat *check out* belanjaaan *online* melalui ponselnya. Budi, salah satu rekan kerja yang sejak lama ingin menjalin hubungan dekat dengan Tania memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan upaya *pedekate*.

Tania : Wuih, sekarang semua bisa dibayar *online*, hebat ya?

Budi : Memang, tapi ada *lho* yang belum bisa dibayar *online*.

Tania : Apaan, tuh?

Budi : Bayar perasaanku yang belum terbalas, mesti pake cara *offline*, nih.

Tania : Hahaha... bisa aja.

Budi : Ngomongin soal belanja. Kemarin kakakku beli susu buat anak, dia *ngeluh*. Katanya seminggu sudah habis, padahal tulisannya 'untuk 2 tahun'.

Tania : Hahaha, beda konsep itu.

Budi : Tapi tahu enggak, ada patung yang sering dipakai buat belanja.

Tania : Patung apaan?

Budi : Patungan bersama... hahaha

Tania : Yee... bilang saja lagi kurang duit. Hahaha

Budi : Btw, lama-lama aku *mikir*, apakah nasibku seperti yang dikatakan peribahasa, bersatu

kita teguh, bersama kita enggak mungkin, ya?

Tania : Ih, apaan sih..

Budi : Aku juga khawatir hubungan kita seperti kisah cinta segi tigaku sama uang.

Tania : Hah?

Budi : Iya. Aku suka uang, tapi uang suka *abis*.

Tania : Hahaha...



Asal Klik, Bisa Panik!

Kemudahan berbelanja dan mengakses informasi sering kali membuat kita lupa untuk berhati-hati. Padahal, risikonya bisa jauh lebih besar daripada yang Sobat bayangkan.



Jangan Asal Klik

Jika menemukan *website* baru, ingat untuk tidak asal klik.



Cek Keamanan Sebelum Berselancar

Sebelum memasukkan informasi atau mengklik *link*, pastikan situs tersebut aman. Dengan langkah sederhana ini, kamu bisa menjelajahi dunia digital dengan lebih aman.



Ancaman Ransomware Mengintai

Salah satu bahaya terbesar dari asal klik adalah *ransomware*. Jika kamu terkena, data pribadimu bisa menjadi taruhannya.



Kesepakatan Menggiurkan bisa Jadi Jebakan

Promo "*best deal*" terkadang merupakan jebakan. Situs-situs ini sengaja dirancang untuk menarik perhatianmu, hanya untuk menguras data atau menyusup ke perangkatmu.

Sobat Rupiah, ingatlah selalu untuk mengecek dulu sebelum menjelajah sebuah *website*. Di era digital ini, keamanan siber perlu diutamakan!



Indonesia Raih Predikat BBB dari S&P

Lembaga pemeringkat S&P kembali mengafirmasi ***Sovereign Credit Rating Republik Indonesia*** pada peringkat **BBB**, satu tingkat di atas *investment grade*, dengan *outlook* stabil, pada 30 Juli 2024.

S&P Global Ratings

Investment Grade Ratings (IG)	AAA	Extremely strong
	AA+	Very strong
	AA	
	AA-	Strong
	A+	
	A	
A-	Adequate	
BBB+		
BBB		
Non-Investment Grade Ratings (HY Status)	BBB-	Less vulnerable
	BB+	
	BB	
	BB-	More vulnerable
	B+	
	B	
	B-	Currently vulnerable
CCC+		
CCC		
Default	CCC-	Currently highly vulnerable
	CC	
	C	Default
	SD	
D		

Sumber: S&P, diolah

BANK INDONESIA
DIGITAL
CONTENT
COMPETITION
2024



Link Pendaftaran

